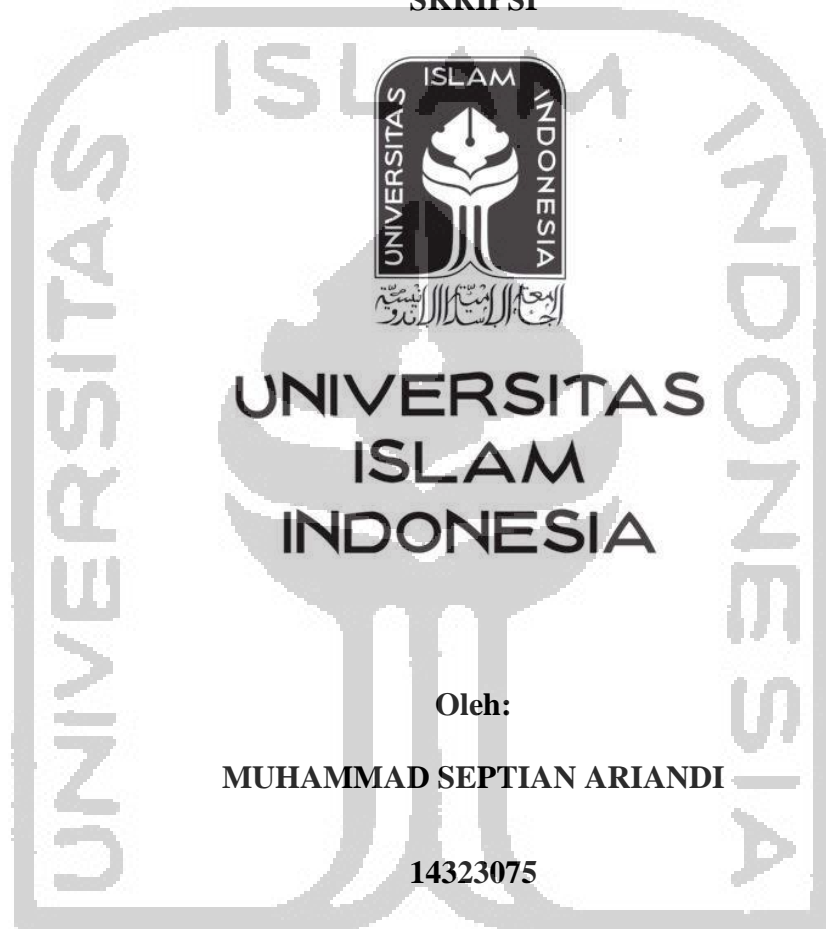


STRATEGI INDONESIA DALAM MENGHADAPI HAMBATAN EKSPOR

MOBIL OLEH PEMERINTAHAN VIETNAM PADA MASA

PEMERINTAHAN JOKO WIDODO TAHUN 2017-2019

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MUHAMMAD SEPTIAN ARIANDI

14323075

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2019

**STRATEGI INDONESIA DALAM MENGHADAPI HAMBATAN EKSPOR MOBIL
OLEH PEMERINTAHAN VIETNAM PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO
WIDODO TAHUN 2017-2019**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana 1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MUHAMMAD SEPTIAN ARIANDI

14323075

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2019

HALAMAN PENGESAHAN
STRATEGI INDONESIA DALAM MENGHADAPI HAMBATAN EKSPOR MOBIL
OLEH PEMERINTAHAN VIETNAM PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO
WIDODO TAHUN 2017-2019

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal
26 NOV 2019

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketia Program Studi

Pengantar: Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
2. Karina Utama Dewi, S.I.P., M.A.
3. Gustrieni Putri, S.I.P., M.A.

Karina
Gustrieni

ISLAM PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Muhammad Septian Ariandi
No. Mahasiswa : 14323075
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Hambatan Ekspor Mobil Oleh
Pemerintahan Vietnam Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun
2017-2019

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 26 November 2019

Yang menyatakan


Muhammad Septian Ariandi

Muhammad Septian Ariandi

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil' alamin

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk orang-orang yang aku cintai dan aku sayangi:

“Kedua Orang Tuaku”

Ucapan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda Achmad Firizali dan Ibunda Halimah (Alm), dan Rafiqah yang telah memberikan do'a, semangat, pengorbanan, dukungan, nasehat, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.

“Kakak-adikku”

Ucapan terima kasih kepada saudaraku tersayang Rika, Riswan, dan Nuge atas semua do'a, semangat, dukungan, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN MOTTO

“Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang.”

Soekarno

“Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah kedua.”

Buya Hamka

“Seribu orang tua bisa bermimpi, satu orang pemuda bisa mengubah dunia.”

Soekarno

“Matur nuwun sanget Ngayogyakarta Hadiningrat. Ilmu, konco, lan nglakoni kedewasaan ing insan sing teko neng kota panjenengan, amargi ing pojok pangonmu iso nggawe nyaman.”

(Terima kasih banyak Ngayogyakarta Hadiningrat. Ilmu, teman, dan perjalanannya mendewasakan setiap insan yang hadir di kotamu, serta di setiap sudutmu yang selalu membuat nyaman.)

Muhammad Septian Ariandi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Hambatan Ekspor Mobil Oleh Pemerintahan Vietnam Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2017-2019” yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional dapat berjalan dengan lancar.

Sholawat serta alam tak lupa senantiasa penulis haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman, yang mana telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini sesuai ketentuan Allah SWT.

Dengan penuh kesadaran, penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Namun, penulis telah berusaha dengan kemampuan yang dimiliki semaksimal mungkin agar hasil dari penulisan skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak, terutama bagi para akademisi. Selama penulisan skripsi ini, penulis mengalami banyak kendala, tetapi dengan usaha yang tak henti-hentinya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dengan itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Enggar Furi Hardianto, S.IP., M.A., selaku Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia dan Pembimbing Skripsi, yang selama ini telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, nasihat, saran, serta telah memberikan pengarahan, dan motivasi serta ilmunya dari awal penulisan proposal sampai penulisan skripsi ini selesai yang sangat membantu penulis.
4. Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah memberikan bimbingan, ilmu, dan motivasi selama belajar di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, yang dengan sabar telah memberikan ilmu, motivasi, dan pengalamannya dari awal perkuliahan sampai dengan saat ini.
6. Staf Program Studi Hubungan Internasional, Staf Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Staf Perpustakaan Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kemudahan dan bantuan segala urusan selama ini.
7. Teman-teman dan sahabat di Prodi Hubungan Internasional dan di luar prodi yang selama ini telah berbagi kebersamaan, kerjasama, kesenangan dan kesedihan, serta bantuan dan do'anya yaitu Alfian, Gharby, Galang, Bagir, Habib, Ongkeng, Dhani, Anang, Firman, Olky, Ikmal, Robi. Saya selaku penulis berharap semoga tali persaudaraan kita tidak putus sampai di sini, Amin ya rabbal'amin.

8. Kedua orang tua yaitu Ayahanda Acmad Firizali dan Ibunda Halimah (Alm), dan Rafiqah yang telah memberikan do'a, semangat, pengorbanan, dukungan, nasehat, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.
9. Saudara kandung dan adik Rika, Riswan, Nuge atas semua do'a, semangat, dukungan, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.
10. Serta sahabat-sahabat saya selama di Jogja Nabel, Rama, Arthur, Bimbo, Tama dan Keluarga rumah 252.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu baik langsung maupun tidak langsung yang telah membantu selama ini dan selama penulisan skripsi ini.

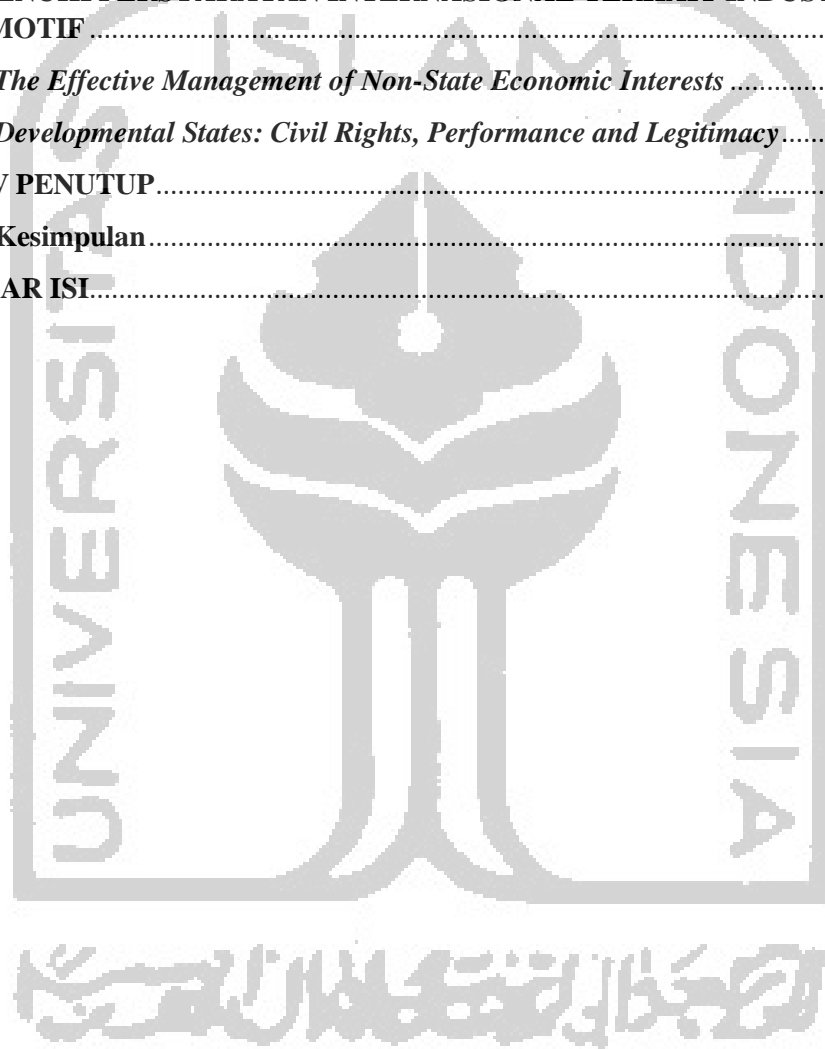
Saya selaku penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selain itu, selama ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak kekeliruan dan kekurangan, untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan pada masa yang akan datang dan khususnya bagi pengembangan ilmu pada bidang Hubungan Internasional, Amin ya rabbal'amin.

Muhammad Septian Ariandi

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Signifikansi Penelitian	5
1.5 Cakupan Penelitian	5
1.6 Kajian Pustaka	6
1.7 Landasan Teori	13
<i>Developmental State</i>	13
1.8 Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Subjek Penelitian	22
3. Alat Pengumpulan Data	22
4. Proses Penelitian	23
BAB II KETERKAITAN ELIT BIROKRASI DI INDUSTRI OTOMOTIF DAN KEKUATAN PEMERINTAH DALAM MENGINTERVENSİ KEBIJAKANNYA DI INDONESIA	24
2.1 The Developmental Elite	24
2.2 Relative Autonomy of the Developmental State	36

BAB III STRATEGI ELIT BIROKRASI DAN ORGANISASI DALAM MENYESUAIKAN REGULASI INDONESIA-VIETNAM DI BIDANG INDUSTRI OTOMOTIF	53
3.1 <i>The Economic Bureaucracy: Power, Competence, Insulation and Penetration</i>	53
3.2 <i>Developmental States and Civil Society</i>	67
BAB IV STRATEGI PEMERINTAH DAN SEKTOR SWASTA INDONESIA DALAM MEMENUHI PERSYARATAN INTERNASIONAL TERKAIT INDUSTRI OTOMOTIF	72
4.1 <i>The Effective Management of Non-State Economic Interests</i>	72
4.2 <i>Developmental States: Civil Rights, Performance and Legitimacy</i>	80
BAB V PENUTUP	87
5.1 Kesimpulan	87
DAFTAR ISI	93



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Ekspor Mobil Indonesia (Jayani, 2019)..76



ABSTRAK

Industri otomotif Indonesia merupakan salah satu industri yang memiliki pabrik mobil yang diakui pasar internasional dalam kualitasnya, maka tidak diherankan bahwa Indonesia mampu memproduksi mobil terbanyak ke 2 di ASEAN. dalam segi ekonomi industri otomotif merupakan sumber pendapatan bagi PDB Indonesia dan memiliki prospek yang menjanjikan, namun pada tahun 2018 pasar terbesar industri otomotif Indonesia yaitu Vietnam mengeluarkan *Decree No.116/2017* dan *Circular No.03/2018* yang menghambat ekspor mobil Indonesia ke negara tersebut. Melihat permasalahan yang terjadi diperlukan peran pemerintah Indonesia yaitu Joko Widodo untuk mencari jalan keluar agar permasalahan tersebut teratasi serta membantu perusahaan industri otomotif dalam melancarkan kembali ekspor mobil ke negara Vietnam melalui strategi maupun kebijakan yang di keluarkan.

Kata Kunci: *Indonesia, Industri Otomotif, Ekspor, Decree No. 116/2017 dan Circular No. 03/2018, Vietnam.*

ABSTRACT

Indonesia's automotive industry is one of the industries that has a car factory in the international market in its quality, it is not suggested that Indonesia is able to produce the most car to 2 in ASEAN. In terms of the automotive industry is a source of income for Indonesian GDP and has promising prospects, but in the year 2018 the largest market of Indonesia's automotive industry, Vietnam issued Decree No. 116/2017 and Circular No. 03/2018 which inhibits the export of Indonesian cars to the country. Looking at the problem that took place the role of the Indonesian government is Joko Widodo to find a way out so that the problem is resolved and help the automotive industry companies in launching re-export the car to the country of Vietnam through the strategy and policies that are issued.

Keywords: *Indonesia, automotive industry, exports, Decree No. 116/2017 and Circular No. 03/2018, Vietnam.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mengembangkan industri otomotifnya hingga kini Vietnam menjadi negara ke 4 di Asia tenggara yang mampu memproduksi mobil pada tahun 2017, tercatat sepanjang tahun 2017 Vietnam memproduksi mobil sebanyak 195.937 unit (Priyanto, 2018). Produk otomotif merupakan produk unggulan bagi Vietnam meskipun terdapat produksi-produksi lainnya seperti perikanan, pertanian, manufaktur, bahan-bahan mentah. Vietnam ingin industri otomotifnya memperoleh 35-40% komponen sendiri pada tahun 2020 naik 10% dari tahun 2018 (Onishi, 2019). Namun pemerintah Vietnam merasa kurang dalam pengembangan industri otomotif karena ke kurangan produksi di bidang bahan baku, teknologi, dan mahalanya biaya impor dalam suku cadang.

Pada 1 Januari 2018 pemerintah Vietnam mengeluarkan kebijakan baru yaitu *Prime Minister Decree No. 116/2017 (Decree on Requirements for Manufacturing, Assembly and Import of Motor Vehicle and Trade in Motor Vehicle Warranty and Maintenance Services)* dan *Circular No. 03/2018 (Regulation on the Checking on Imported Automobiles for Technical Safety and Environmental Protection)* (thuvienphapluat, 2018). Peraturan baru tersebut menghambat pengekspor mobil ke negara Vietnam karena harus melakukan uji tipe. kebijakan

Decree No.116/2017 berlaku pada 1 Januari 2018 bersamaan dengan kebijakan ASEAN dalam perdagangan bebas, dan akan diberlakukan pembebasan tarif impor dari negara-negara anggota ASEAN menjadi pajak 0% untuk *Completely Built Unit (CBU)*, dalam kebijakan tersebut berisi tentang peraturan ketat seperti perakitan, pembuatan mobil, serta para eksportir mobil harus memiliki sertifikasi *VTA (Vehicle Type Approval)* sehingga dalam setiap mobil yang di impor ke negara Vietnam akan diperiksa dan menjalani tes untuk melihat kelayakan mesin dan kualitas mobil dalam keamanan, serta kualitas kendaraan.

Peraturan baru tersebut sangat mengganggu perekonomian negara yang bekerja sama dengan Vietnam dalam hal otomotif seperti Indonesia, dimana Indonesia sendiri setiap tahunnya mampu mengekspor mobil ke Vietnam dengan jumlah yang sangat besar sekitar 30.000-40.000 unit mobil, selain itu terhambatnya ekspor mobil ke Vietnam dengan adanya peraturan tersebut mempengaruhi standar SNI milik Indonesia karena dianggap tidak sesuai dengan standar di negara Vietnam (Fauzie, 2018). Vietnam merupakan pasar yang sangat strategis bagi Indonesia sebab banyak mobil buatan Indonesia di ekspor ke Vietnam, dalam segi ekonomi Vietnam merupakan sumber pendapatan bagi PDB Indonesia dan memiliki prospek yang menjanjikan serta potensi memadai yang dimiliki Indonesia mampu mengembangkan industri otomotif, kendala impor yang dibuat oleh Vietnam sangat mengganggu kerjasama bilateral dengan Indonesia yang sudah terjalin sejak lama pada tahun 1955 yang ingin meningkatkan kerjasama

perdagangan serta mampu mengganggu ASEAN untuk mewujudkan visi dan misinya yaitu menjaga perdamaian dan stabilitas dalam kawasan Asia Tenggara (Aria, 2017).

Dengan demikian, Indonesia mampu mengekspor mobil ke Vietnam dengan jumlah yang sangat besar pertahunnya. Namun, pada periode Januari-Juli 2018 bersamaan dengan kebijakan baru yang di keluarkan pemerintah Vietnam menghambat pekeksporan mobil ke negara tersebut, untuk mobil-mobil yang telah sampai di Vietnam masih belum jelas kondisinya karena terhalang oleh peraturan baru yang dikeluarkan oleh Vietnam. Mobil-mobil tersebut tertahan di pelabuhan untuk menjalani berbagai tes kelayakan dan membuat biaya tambahan (Yolanda, 2018). Oleh karena itu, dengan adanya kendala ini selain kehilangan pemasukan yang cukup besar dari pelarangan ekspor mobil ke Vietnam, juga diperlukan peran pemerintah untuk mencari jalan keluar agar mampu mengekspor kembali ke negara Vietnam mengingat bahwa banyak industri otomotif indonesia yang di ekspor ke negara-negara Asia Tenggara terutama Vietnam. Sehingga dalam hal ini, Indonesia menghadapi hambatan ekspor mobil oleh pemerintah Vietnam pada masa pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2017-2019.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dijelaskan bahwa keputusan Vietnam mengeluarkan *Decree No.116/2017* pada bulan November tahun 2017

mengancam para negara yang melakukan ekspor industri mobil. Di mana kebijakan ini mulai diberlakukan pada 1 Januari 2018 bersamaan dengan kebijakan ASEAN dalam perdagangan bebas. Kebijakan tersebut terkait diberlakukannya pembebasan tarif impor dari negara-negara anggota ASEAN menjadi pajak 0-5%. Namun keputusan pemerintah Vietnam terkait kebijakan impor mobil ke negara mereka memicu kekhawatiran terhadap Indonesia karena Vietnam sendiri merupakan pasar ekspor otomotif bagi Indonesia. Sehingga penulis dalam penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu: **Bagaimana strategi Indonesia dalam menghadapi hambatan ekspor oleh Vietnam untuk komoditas mobil pada tahun 2017-2019?**

1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk menganalisis, dan memaparkan, terkait strategi Indonesia dalam menghadapi hambatan ekspor mobil oleh pemerintah Vietnam pada masa pemerintahan Joko Widodo tahun 2017-2019 dengan menggunakan teori *Developmental State*.

1.4 Signifikansi Penelitian

Topik dari Skripsi ini cukup penting untuk diteliti dan masih belum banyak dibahas, sebab kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Vietnam pada 1 Januari 2018 bersamaan dengan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) atau perdagangan bebas ini cukup mengkhawatirkan negara-negara yang pemasukan PDBnya melalui

industri otomotif terutama mobil seperti Indonesia, yang mana tujuan utama ekspor mobil mereka ke negara Vietnam. Kebijakan tersebut memiliki kompleksitas mulai dari dalam Domestik hingga Internasional, banyaknya hambatan dari dalam negeri hingga luar negeri membuat kebijakan tersebut banyak mendapat pertentangan. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan bagaimana strategi untuk menghadapi kebijakan Vietnam tersebut khususnya dari negara Indonesia agar kendala yang dihadapi bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan dan sama-sama menguntungkan. Maka dari itu penulis akan memfokuskan strategi Indonesia dalam menghadapi kebijakan Vietnam terkait *Decree No.116/2017* pada era Joko Widodo sebagai variabel yang dianalisis dalam perspektif *Developmental State*.

1.5 Cakupan Penelitian

Kajian dalam topik ini merupakan kajian baru yang belum banyak di bahas pada tahun 2017-2019. Pemilihan tahun 2017-2019 didasari dengan isu permasalahan yang di alami Indonesia terkait hambatan ekspor mobil ke negara Vietnam. Sehingga menurut penulis, dengan pemilihan tahun tersebut merupakan pemilihan yang tepat sehingga pembahasan dalam skripsi ini tidak melebar lebih jauh dari topik yang akan di bahas. kajian ini akan menganalisis Bagaimana peran pemerintah Indonesia menghadapi kebijakan baru Vietnam agar tidak terjadi hambatan dalam industri otomotif khususnya mobil. Adapun hal lainnya yang penting untuk diketahui oleh penulis akan dilakukan agar mampu

menginterpretasikan hasil penelitiannya sesuai dengan pokok permasalahan terhadap objek yang ingin diamati.

1.6 Kajian Pustaka

Penulis dalam penelitian ini melakukan kajian kepustakaan dengan bersumberkan dari berbagai referensi terkait kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Vietnam pada bidang otomotif, diantaranya sebagai berikut:

Pada literatur yang berjudul “*Dinamika Struktur-Agensi dalam Perkembangan Industri Otomotif Indonesia*” (Adnan, 2014), membahas terkait perkembangan industri otomotif antara pengusaha dan kekuasaan pada masa Orde Baru. Dinamika dalam industri otomotif yang pada berkaitan erat dengan konteks sosial, ekonomi-politik yang berkembang. Di mana ketika militer mendominasi pada era orde baru, industri otomotif juga turut didominasi oleh kekuatan militer. Demikian pula ketika didominasi oleh kelompok lain atau kekuatan lain, maka industri otomotif juga didominasi oleh kelompok atau kekuatan tersebut.

Ketika industri otomotif melibatkan militer yang mendukung pemerintahan orde baru di mana pada akhirnya berseberangan dengan pemerintah. Maka dengan hal tersebut, keterlibatan militer dalam industri otomotif juga mengalami penurunan. Kemudian keterlibatan pengusaha-pengusaha etnis Cina dalam membangun industri otomotif di Indonesia. Pengusaha-pengusaha tersebut berhasil mengembangkan bisnisnya dengan membangun kedekatan khusus dengan para elit

pada waktu itu yang menyebabkan adanya pengaruh terhadap industri otomotif. Selanjutnya adanya peran kelompok islam modernis yang mendominasi industri otomotif mulai menyurutkan kelompok militer dan etnis Cina. Sehingga memiliki pengaruh dan mendominasi industri otomotif di Indonesia.

Literatur yang berjudul “*Analisis Daya Saing dan Kesiapan Indonesia Dalam Rangka Integrasi ASEAN: Studi Kasus Automotives, Rubber Based, dan Agro Based Product*” (Arianti & Lubis, 2011), membahas terkait industri otomotif, bahan baku karet, dan *agro based product* Indonesia merupakan sektor penggerak perekonomian ASEAN. Namun di sini industri otomotif Indonesia memiliki tingkat integrasi yang sedang untuk pasar otomotif pada pasar dunia. Sehingga industri otomotif Indonesia memiliki daya saing untuk produk-produknya hampir di seluruh negara ASEAN. Di mana artinya liberalisasi yang dilakukan oleh Indonesia pada industri otomotif meningkatkan daya saing dengan negara-negara ASEAN.

Literatur selanjutnya berjudul “*Peningkatan Kerja Sama Bilateral Indonesia-Vietnam*” (Lisbet, 2017), membahas terkait pentingnya peningkatan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Vietnam. Sebab peningkatan kerja sama ini memiliki arti penting bagi kedua negara. Indonesia menganggap penting Vietnam dan begitu juga sebaliknya. Arti penting kerja sama ini menjadi acuan bagi kedua negara karena dalam kerja sama bilateral ini mencapai perdagangan sebesar 10 miliar USD pada tahun 2018. Sehingga pemerintah dan komunitas usaha dari kedua negara didorong untuk aktif menjalin pertukaran informasi, promosi

investasi, dan konektivitas badan usaha agar dapat mengoptimalkan berbagai potensi peluang kerja sama dari kedua negara ini.

Pada literatur yang berjudul “*An Assessment of the Potential Economic Impact of RCEP on Viet Automobile Sector*” (Anh, Ngoc, & Hurong, 2017), membahas terkait dampak dari perjanjian perdagangan ASEAN+6 tentang industri mobil Vietnam. Dalam literatur ini menjelaskan bahwa industri mobil Vietnam bersaing dengan Thailand, Indonesia, dan negara-negara ASEAN serta Tiongkok, Jepang, dan Korea. Selain itu, dalam literatur ini dijelaskan juga bahwa pasar mobil di Vietnam memiliki dua segmen utama, yaitu *Completely knocked Down* (CKD) dan *Completely Bulid Up* (CBU). Kendaraan CKD merupakan kendaraan yang dirakit di Vietnam atau dirakit secara lokal dengan menggunakan semua bagian utama, komponen, dan teknologi yang berasal dari impor negara asalnya. Sedangkan kendaraan CBU merupakan kendaraan yang sepenuhnya dirakit di luar Vietnam.

Pada literatur selanjutnya berjudul “*Reforming Automobile Excise Taxes in the ASEAN Region for Pro-growth and Pro-Environment Outcomes*” (Preece, 2016), membahas terkait hadirnya MEA dalam kawasan ASEAN berdampak signifikan terhadap penstabilan ekonomi negara-negara yang bergabung dalam ASEAN. Adanya MEA mereformasi kebijakan negara masing-masing untuk mendukung pengimplementasian MEA menjadi basis produksi dan pasar tunggal dalam kawasan secara global. Tidak terkecuali Vietnam pada tahun 2015

mengeluarkan keputusan 108/2015/ ND-CP untuk penyesuaian tarif bea cukai dan pajak terhadap perakitan dan impor mobil sesuai dengan kriteria. Sehingga Vietnam dan negara-negara ASEAN berupaya membangun pasar tunggal yang merupakan peluang bagi industri dalam membangun dan menjual produk industri termasuk otomotif.

Pada literatur yang berjudul *“Host-Site Institutions, Regional Production Linkages and Technological Upgrading: A Study of Automotive Firms in Vietnam”* (Nguyen, Nguyen, Nguyen, & Nguyen, 2016) membahas terkait industri otomotif Vietnam yang sedang dalam tahap upgrade teknologi yang mana dalam negerinya Vietnam telah memiliki industri dalam perakitan mobil dan memiliki OEM (*original equipment manufacturing*) untuk mobil keluaran negara mereka yang bermerk Thanh Cong dan Vinaxuki yang mana mobil ini dirakit bersama perusahaan swasta serta perusahaan pemerintah BUMN, selain itu Vietnam juga memiliki pemasok komponen seperti ban yang dimiliki perusahaan Kumho and Da Nang Rubber Company, Dap Cau Glass yang memproduksi kaca mobil and Dong Nai Battery Company yang memproduksi batrai. Tetapi seperti dalam kasus kaca mobil pemerintah lebih memilih impor karena memiliki kualitas yang lebih baik serta perusahaan yang memproduksi komponen tersebut masih memiliki teknologi yang rendah.

Selanjutnya pada literatur yang berjudul *“Driving Development? The Problems and Promises of the Car in Vietnam”* (Hansen, 2016) pemerintah

Vietnam mencoba mengembangkan industri otomotif bersama dengan investor asing agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun pada saat yang sama pemerintah Vietnam sendiri membatasi industri otomotif mereka untuk berkembang seperti pajak yang tinggi dan kurangnya koordinasi antar menteri dan pihak swasta seperti VAMA (*Vietnam Automobile Manufacturers*) sehingga menggambarkan lemahnya strategi pembangunan Vietnam hal ini membuat industri otomotif Vietnam tidak dapat bertahan dalam persaingan produsen di ASEAN.

Pada literatur-literatur di atas, memiliki persamaan yaitu membahas terkait kerja sama bilateral antara Indonesia dan Vietnam. Kemudian membahas terkait perkembangan industri otomotif Indonesia berdasarkan pengaruh dan dominasi kelompok terhadap industri otomotif di Indonesia itu sendiri. Literatur di atas juga membahas terkait peluang yang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan industri komponen otomotif yang dimiliki dan membahas terkait industri otomotif, bahan baku karet, dan *agro based product* Indonesia merupakan sektor penggerak perekonomian ASEAN. Namun di sini industri otomotif Indonesia memiliki tingkat integrasi yang sedang untuk pasar otomotif pada pasar dunia. Sehingga industri otomotif Indonesia memiliki daya saing untuk produk-produknya hampir di seluruh negara ASEAN.

Selanjutnya literatur di atas juga membahas terkait pentingnya peningkatan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Vietnam. Sebab peningkatan kerja

sama ini memiliki arti penting bagi kedua negara. Selain itu, pada literatur di atas juga membahas terkait dampak dari perjanjian perdagangan ASEAN+6 tentang industri mobil Vietnam dan juga membahas terkait hadirnya MEA dalam kawasan ASEAN berdampak signifikan terhadap penstabilan ekonomi negara-negara yang bergabung dalam ASEAN. Sehingga Vietnam dan negara-negara ASEAN berupaya membangun pasar tunggal yang merupakan peluang bagi industri dalam membangun dan menjual produk industri termasuk otomotif. Dalam sektor otomotif yang ada di Vietnam menjelaskan bahwa industri otomotif Vietnam yang sedang dalam tahap upgrade teknologi yang mana dalam negerinya Vietnam telah memiliki industri dalam perakitan mobil dan memiliki OEM (*original equipment manufacturing*) untuk mobil keluaran negara mereka yang bermerk Thanh Cong dan Vinaxuki yang mana mobil ini dirakit bersama perusahaan swasta serta perusahaan pemerintah BUMN, namun juga dalam pengembangannya pemerintah Vietnam sendiri membatasi industri otomotif mereka untuk berkembang sehingga industri otomotif Vietnam tidak dapat bertahan dalam persaingan produsen di ASEAN.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan literatur-literatur di atas yaitu penelitian ini lebih membahas terkait strategi Indonesia dalam menghadapi hambatan ekspor mobil oleh pemerintahan Vietnam pada masa pemerintahan Joko Widodo. Sebab menurut penulis, topik ini merupakan topik yang relevan dan belum banyak di bahas pada masa pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2017-2019.

Kemudian penulis juga mengambil momen pasca pemerintahan Vietnam mengeluarkan kebijakan baru mengenai dunia otomotif dalam ekspor-impor. Sehingga kajian ini akan menganalisis terkait bagaimana strategi Indonesia dalam menghadapi hambatan ekspor mobil oleh pemerintah Vietnam pada masa pemerintahan Joko Widodo berdasarkan teori *Developmental State*.

Dengan demikian menurut penulis, akan memfokuskan peran pemerintah Indonesia dalam menghadapi kebijakan baru Vietnam tersebut agar tidak terjadi hambatan dalam industri otomotif. Selain itu, penelitian ini juga akan memfokuskan pembahasan terkait sebab dan alasan yang membuat pemerintahan Vietnam mengeluarkan kebijakan *Decree No.116/2017* yang diresmikan pada tanggal 1 Januari 2018 bersamaan dengan diterapkannya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Oleh karena itu, penulis akan membahas dengan menggunakan teori *Developmental State* dari Adrian Leftwich agar dapat menjawab pertanyaan penelitian dalam penelitian ini.

1.7 Landasan Teori

Developmental State

Dalam pengerjaan skripsi ini penulis menggunakan Teori *Developmental State* yang di jelaskan oleh Adrian Leftwich dalam jurnal yang berjudul "*Bringing Politics Back in: Toward a model of the developmental state*", ia menjelaskan bahwa dalam pendekatan *Developmental State* merupakan pemahaman yang

melihat dari hasil-hasil pembangunan ekonomi dan memperlihatkan peran negara dalam proses pembangunan di wilayah Asia Timur, serta melakukan kerjasama terhadap sektor non-pemerintah. Dalam melakukan pembangunan negara merupakan prioritas utama bagi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian, dan negara mempunyai peran yang sangat besar terhadap sektor swasta atau perusahaan non-pemerintah, selain itu pemerintah dapat mengatur institusi yang berpusat pada negara sehingga pemerintah dapat melakukan intervensi ke dalam pasar yang dilakukan oleh aktor swasta dengan cara mengkoordinir, memberi petunjuk, mendisiplinkan dengan memanfaatkan instrumen politik. Pemerintah dalam melakukan pembangunan negara dapat melakukan campur tangan secara penuh terhadap pihak swasta khususnya dalam bidang ekonomi, sehingga dapat menjalankan pasar dengan cepat dan ekonomi mudah dicapai.

Untuk mencapai tujuan pembangunan terhadap negara agar lebih cepat berkembang serta meningkatkan perekonomian, negara yang memiliki kekuatan politik dapat membantu perusahaan swasta dalam mengontrol jalannya pertumbuhan ekonomi dan menjalankan pasar yang terorganisir sehingga dalam pembangunan negara perekonomian lebih cepat berkembang karena pada dasarnya negara mengarahkan kebijakan untuk menjalankan dan mengontrol pasar serta pemerintah memiliki kekuatan untuk melancarkan kerjasama yang dilakukan oleh aktor non-pemerintah (Leftwich, 1995).

Dalam teori *Developmental State* yang diutarakan oleh Adrian Leftwich terdapat 6 indikator untuk melihat bagaimana strategi tersebut berjalan, yang mana hal ini dilihat dari keberhasilan negara Asia Timur seperti Korea Selatan dan Jepang yang dapat di sesuaikan untuk dipakai Indonesia dalam menjalankan strategi pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan di sektor-sektor ekonomi tertentu melalui industri-industri yang ingin di tingkatkan sehingga mampu meningkatkan ekonomi seperti dalam industri otomotif, yaitu (Leftwich, 1995):

1. The Developmental Elite

Dalam melakukan pembangunan negara kepala pemerintahan melakukan upaya-upaya atau intervensi untuk membantu negaranya dalam meningkatkan ekonomi dalam bidang-bidang tertentu, pemerintah juga memiliki keterkaitan erat dengan elit birokrasinya untuk bisa mengembangkan pembangunan negara dan budayanya. Seperti halnya di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo banyak badan-badan tertentu untuk dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara serta meningkatkan industri-industri andalan

Indonesia seperti dalam industri otomotif. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi juga tidak terlepas dari rangkaian bisnis dan perpolitikan dan adanya peran dua sisi dalam keterkaitan yang erat terhadap tokoh, pebisnis, partai, maupun *private sector* untuk memainkan peran politik dan ekonomi. Adanya hubungan tersebut merupakan ciri penting untuk

memiliki tujuan yang sama dalam melakukan pembangunan negara dan ekonomi.

2. Relative Autonomy of the Developmental State

Negara menjadi otonomi relatif bagi para elit dan lembaga negara yang mereka perintahkan untuk dapat melakukan pembangunan negara.

Otonomi relatif memberikan kewenangan pemerintah untuk mengatur ekonomi dan politik serta pemerintah dalam melakukan birokrasinya memiliki keterkaitan dengan pihak-pihak yang ada dalam struktur pemerintahannya, dalam otonomi relatif menjelaskan bahwa pemerintah mampu menuntut kepentingan negara yang membuat adanya hubungan erat antara pemerintah dan aktor non negara serta negara lain. Sehingga mampu mengkoordinasi ekonomi dan melaksanakan tujuan pembangunan negara dengan adanya campur tangan politik dari pemerintahan untuk melakukan pembangunan negara dalam menjadikan negara tersebut semakin kuat dan menjadikan otonomi pembangunan terstruktur.

Contohnya dalam bidang industri otomotif Indonesia adanya badan pemerintah seperti menteri perindustrian, menteri perdagangan, menteri perhubungan dan GAIKINDO yang mengontrol industri otomotif Indonesia untuk memperlancar produktivitas serta meningkatkan teknologi dan menjual ke dalam pasar domestik maupun luar negeri. menteri perindustrian, menteri perdagangan, menteri perhubungan dan GAIKINDO juga dapat membantu pemerintah untuk dapat melancarkan

ekspor mobil dan melakukan mediasi terhadap negara lain ketika industri otomotif Indonesia terhambat seperti yang terjadi terhadap negara Vietnam dimana menteri perhubungan, menteri perdagangan, menteri perindustrian dan GAIKINDO melakukan proses tawar-menawar dengan wakil menteri industri dan perdagangan Vietnam, wakil menteri Vietnam, wakil menteri transportasi, ketua produksi mobil Vietnam VAMA (*Vietnam Automobile Manufacturers*), sehingga kebijakan yang nantinya disetujui akan menjadikan kesepakatan yang dianggap terbaik serta saling menguntungkan.

3. The Economic Bureaucracy: Power, Competence, Insulation and Penetration

Dalam melakukan pembangunan, negara harus menyadari betapa pentingnya pertumbuhan dan memodernisasi, pemerintah juga harus memiliki perencanaan pusat yang efektif. Dimana pemerintah harus bisa membuat strategi untuk dapat melakukan pembangunan di negaranya melalui lembaga yang terhubung dengan pemerintahan agar mampu mengatur perekonomian sehingga pemerintah juga dapat memfasilitasi pasar yang dilakukan oleh aktor swasta dan dapat memodernisasi negara.

Pemerintah juga harus mendukung perusahaan swasta secara penuh untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan perusahaan tersebut. contohnya terhadap industri otomotif Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat kebijakan-kebijakan yang

nantinya akan memperbesar pasar otomotif dalam negeri maupun ekspor melalui kementerian perindustrian, menteri perdagangan, menteri perhubungan dan GAIKINDO.

4. Developmental States and Civil Society

Perkembangan disuatu negara juga tidak lepas dari konteks sosial-ekonomi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Dalam keberhasilan melakukan pertumbuhan ekonomi negara dan promosi, tidak lepas dari munculnya masyarakat sipil secara aktif, masyarakat mampu merangsang tuntutan kepada pemerintah sehingga dapat membuat perkembangan negara seperti meningkatkan konsumsi domestik, penanaman modal dari investor, peningkatan pendidikan, dan memperluas lapangan pekerjaan, dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Namun pemerintah dalam meningkatkan ekonominya tidak mampu membangun ekonomi sendirian sehingga perlu adanya bantuan seperti sektor swasta dan menimbulkan kekuatan sosial-politik, sehingga GAIKINDO juga mampu merangsang pertumbuhan dan melindungi industri otomotif Indonesia, dan seperti kebijakan pemerintah terhadap industri otomotif dalam memprioritaskan mobil-mobil yang hemat energi dan ramah lingkungan serta memiliki harga yang terjangkau bagi masyarakat, dan membantu masyarakatnya dalam meningkatkan pendidikan maupun lapangan pekerjaan.

5. Developmental States and Economic Interests

Strategi pembangunan dan hubungan antara pemerintah terhadap elit birokrasinya maupun pihak swasta, dimana kekuasaan pemerintah lebih memaksakan untuk dijalankan meskipun tidak sesuai dengan kepentingan dari aktor swasta sehingga pemerintah yang memiliki kekuatan politik mampu mempertegas kebijakan agar mampu mengatur, mendorong munculnya pertumbuhan ekonomi, ruang lingkup, fokus kegiatan, dan promosi dalam arah yang sesuai dengan strategi pembangunan yang merupakan pondasi dalam meningkatkan ekonomi meskipun merugikan aktor-aktor tersebut. Dalam kasus ini untuk dapat meningkatkan industri otomotif pemerintah memaksakan bagaimana industri otomotif dapat memenuhi persyaratan dan kelayakan produk seperti pengujian, administrasi, sertifikasi sebelum menjual produknya sehingga sesuai dengan standar internasional namun hal ini tidak menguntungkan bagi pengusaha karena akan menambah waktu pengiriman produk, maupun kenaikan harga produk sehingga kurang kompetitif

6. Developmental States: Civil Rights, Performance and Legitimacy

Dalam pengertian ini pemerintah dalam kebijakannya yang meliputi *Performance and Legitimacy* mampu menjaga industri yang ada di Indonesia agar mampu mendorong dan mempertahankan arus ekonomi sehingga peran pemerintah sangat penting untuk dapat menekankan kebijakan yang represif dan mampu dijalankan meskipun kebijakan

tersebut bersifat memaksa namun dalam legitimasinya memiliki ukuran yang luas dan kinerja yang berkelanjutan secara umum dalam membangun pemerintahan yang baik, pemerintah mampu melakukan pembangunan negara dan ekonomi meskipun adanya tantangan dari masyarakat.

pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan industri otomotifnya melakukan kebijakan seperti undang-undang terhadap investor asing agar dapat menjaga industri domestiknya bersaing dengan negara-negara lain bersama dengan elit birokasinya seperti kementerian perindustrian dan GAIKINDO contohnya dalam melindungi sumber daya alam yang ada di Indonesia ketika adanya investor asing yang membuka pabrik di Indonesia peran pemerintah seperti menteri perindustrian dan GAIKINDO dapat mengkoordinir, dan mengontrol pabrik tersebut agar menjaga lingkungan Indonesia.

Dalam menjalankan proses penelitian ini melihat dari masalah ekspor Indonesia ke Vietnam pada sektor otomotif, diperlukan peran pemerintah Indonesia dalam membantu perusahaan swasta agar melancarkan kerjasama dengan negara Vietnam yang mana pemerintah Vietnam mengeluarkan kebijakan *Decree No.116/2017* dan *Circular No. 03/2018* sehingga menghambat ekspor otomotif ke negara Vietnam. Penulis melihat hal-hal apa saja yang melatarbelakangi kebijakan yang di pilih oleh presiden Joko Widodo untuk menghadapi kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah Vietnam mengenai *Decree*

No.116/2017 dan Circular No. 03/2018. Untuk memahami proses kebijakan yang dikeluarkan oleh negara Vietnam terkait Decree No.116/2017 dan Circular No. 03/2018, penulis menggunakan konsep Developmental State untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana strategi Indonesia menghadapi kebijakan tersebut agar kerjasama yang terjalin berjalan lancar kembali.

Seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Vietnam mengenai larangan impor mobil yang telah diresmikan pada 1 Januari 2018 membuat Indonesia kehilangan pemasokan dana dan kerugian yang sangat besar. Kebijakan Vietnam tersebut merupakan langkah besar bagi Vietnam sendiri untuk meningkatkan industri otomotif dalam negeri, namun bagi Indonesia hal ini justru membuat hilangnya pasar otomotif mereka sehingga membutuhkan langkah-langkah dalam pengambilan kebijakan untuk melihat bagaimana kesepakatan antara Indonesia-Vietnam pada masa pemerintahan Joko Widodo tercapai.

Dalam kasus ini diperlukan pertimbangan dari kedua belah pihak serta proses tawar menawar pilihan sehingga memberikan kesepakatan yang terbaik, penulis ingin memahami lebih lanjut bagaimana kebijakan yang di tawarkan oleh Indonesia agar ekspor mobil mereka tidak terhambat. Penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai strategi Indonesia dalam menghadapi hambatan ekspor mobil oleh pemerintah Vietnam pada masa pemerintahan Joko Widodo.

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, Metode Kualitatif sendiri merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi di dalam suatu permasalahan untuk memiliki hasil deskriptif, permasalahan tersebut didasari pada data maupun temuan yang sudah didapat berupa sebuah opini. Untuk mendapatkan gambaran secara umum penelitian ini akan menggunakan analisis yang didasari dari teori *Developmental State* agar memandu jalannya penelitian melalui pengumpulan data dengan topik yang akan dibahas (Sugiarto, 2015, p. 8) Dalam menganalisis masalah dalam topik yang akan dibahas penulis akan mengumpulkan data-data untuk dibandingkan agar pembahasan lebih akurat.

2. Subjek Penelitian

Dalam subjek penelitian ini akan meneliti strategi Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan luar negerinya dalam menangani kasus pelarangan impor mobil dari Vietnam pada masa pemerintahan Joko Widodo, sebab kebijakan yang dikeluarkan oleh Vietnam merupakan ancaman bagi industri otomotif Indonesia dan memberikan efek yang cukup besar bagi perekonomian, belum banyak peneliti yang menyoroiti kasus ini sehingga pemilihan subjek

penelitian ini akan memudahkan penulis untuk mencari data dan menjawab permasalahan yang akan dibahas.

3. Alat Pengumpulan Data

Metode pengambilan data ini akan menggunakan studi literatur karena penulis akan menggunakan data dengan sumber seperti Buku, Jurnal, maupun Artikel, website resmi, agar penelitian ini mendapatkan sumber referensi yang valid/terpercaya. Penelitian yang dibuat oleh penulis dapat mengkaji lebih dalam dan dapat memperoleh suatu kebenaran dan kepastian. Selain itu dalam proses pengumpulan data penulis akan melakukan penelusuran pustaka seperti ke perpustakaan yang ada di Yogyakarta, selain menggunakan studi Literatur penulis akan menggunakan data sekunder dengan pengumpulan data seperti internet dan dokumen agar mempermudah proses pengerjaan.

4. Proses Penelitian

Proses penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif dengan data yang telah dikumpulkan serta disiapkan untuk dianalisis dan akan dibuat menjadi subtopik dan di catat, subtopik tersebut akan dibaca dan dikembangkan secara keseluruhan lagi agar penelitian ini mendapatkan ide-ide yang lebih detail. Penelitian ini akan dituliskan dari berbagai sumber yang sudah dikembangkan serta permasalahan akan di gambarkan melalui subtopik yang telah disusun sesuai dengan topik yang dibahas, tujuan ini dimaksudkan agar

penulis lebih fokus serta menajamkan pembahasan yang akan di teliti sehingga memudahkan untuk melakukan penarikan kesimpulan.



BAB II

KETERKAITAN ELIT BIROKRASI DI INDUSTRI OTOMOTIF DAN KEKUATAN PEMERINTAH DALAM MENGINTERVENSI KEBIJAKANNYA DI INDONESIA

Pada bab ini penulis akan membagi menjadi 2 bagian yaitu konsep *Developmental Elite* melihat bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan industri otomotifnya dan keterkaitan antara pemerintah dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam membantu melancarkan industri otomotif, dan bagaimana *relative autonomy* dalam intervensi pemerintah terhadap industri otomotif dan intervensinya dalam perdagangan internasional untuk dapat meningkatkan produk-produk unggulan Indonesia mampu bersaing dengan produk luar negeri serta melihat bagaimana Indonesia dalam meningkatkan standarnya menjadi standar internasional dari segi kualitas, keamanan, dll.

2.1 The Developmental Elite

Developmental Elite menjelaskan bagaimana adanya keterkaitan elit birokrasi dalam menentukan arah kebijakan yang di keluarkan pemerintah terhadap industri otomotif di Indonesia. Elit-elit birokrasi yang memiliki keterkaitan terhadap industri otomotif pada masa pemerintahan Joko Widodo tidak terlepas dari rangkaian bisnis dan politik sehingga memiliki kepentingan

terhadap industri otomotif. Namun adanya hubungan yang kuat antara pemerintah dengan elit-elitnya mampu melihat bagaimana strategi pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

- **Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan Industri Otomotif Nasional**

Dalam mendorong perkembangan pembangunan terhadap sektor industri otomotif dan meningkatkan ekonomi negara pemerintah melakukan upaya-upaya untuk melancarkan sektor-sektor tersebut dengan berbagai kebijakan dan kerja sama, di mana pemerintah menempatkan posisinya untuk ikut serta dalam memajukan sebuah negara seperti bekerja sama dengan berbagai pihak seperti menteri, dan pihak swasta, peran pemerintah dalam menjalankan kebijakannya merupakan aktor utama untuk bisa membantu pihak-pihak lain dalam menjalankan sektor-sektor yang mereka jalankan. Untuk melihat bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah dalam membantu sebuah negara dilihat melalui strategi yang mampu mendorong pihak-pihak lain untuk terus membangun inovasi, investasi, maupun masalah-masalah yang akan dihadapi kedepannya.

Pemerintah Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo merupakan pemegang tertinggi kekuasaan eksekutif dalam pemerintahannya, di mana pemerintah dalam menjalankan tugasnya memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat mengembangkan pembangunan dan strategi ekonomi yang terarah, pemerintah juga memberikan tugas terhadap elit-elit birokrasinya, pihak swasta

maupun masyarakat untuk dapat membangun negara bersama-sama. Pemerintah yang memiliki *power* di sebuah negara mampu memberi kebijakan untuk mengarahkan negara tersebut untuk bergerak sesuai dengan arah pembangunan yang di inginkan, seperti dalam industri otomotif pemimpin pemerintahan saat ini yaitu Presiden Joko Widodo berusaha dalam mengarahkan industri otomotifnya untuk dapat mengejar ketertinggalan dari negara lain dengan memberikan kebijakan yang terarah dalam perkembangan industri otomotif saat ini bersama dengan elit birokrasinya.

Sebelum menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo merupakan salah satu Wali Kota Solo yang menjabat selama dua periode, di mana dalam masa kepemimpinannya turut serta dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, budaya, pendidikan, serta salah satunya berada di industri otomotif yaitu Esemka, Presiden Joko Widodo memperjuangkan mobil tersebut menjadi mobil nasional, mobil Esemka ini merupakan mobil buatan Indonesia yaitu PT. Solo Manufaktur Kreasi (SMK) di mana mesin dan desainnya merupakan karya anak SMK dan komponennya 80% dibuat oleh industri-industri kecil, sehingga ketika Joko Widodo menjabat sebagai Presiden untuk dapat meningkatkan produksi dan menjadikan mobil nasional buatan Indonesia pada tahun 2014 mobil Esmeka menjalin kerja sama dengan PT. Adiperkasa Citra Lestari (ACL) yang dimiliki oleh mantan Kepala Badan Intelijen Negara yaitu Abdullah Makhmud Hendropiyono hal ini merupakan dukungan Presiden Joko Widodo

terhadap industri otomotif Indonesia. Semenjak menjadi Wali Kota Solo Joko Widodo sudah mampu meningkatkan industri otomotif kota Solo menjadi mobil nasional serta mobil dinas, dimana ia telah mendukung berkembangnya industri otomotif Indonesia (Quraisyi, Marjono, & Soepeno, 2017, pp. 193-194).

Mobil Esemka merupakan mobil buatan Indonesia yang memiliki standar Internasional di mana dalam pembuatannya melibatkan 33 UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) serta memiliki harga yang murah untuk model transportasi perkotaan, sehingga mampu membuat masyarakat yang memiliki pendapatan menengah kebawah membeli mobil tersebut, dalam pengembangan mobil Esemka ini mampu memberikan masyarakat terhadap pendidikan dan inovasi khususnya dalam bidang transfer teknologi hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keberhasilan dalam menciptakan teknologi, dalam meningkatkan industri otomotif tersebut juga tidak terlepas dari adanya aktor-aktor yang terlibat seperti pihak swasta, instansi pemerintahan seperti politikus dan menteri yang membantu pengembangan otomotif Indonesia.

Presiden Joko Widodo dalam jabatannya bersama dengan menteri perdagangan, menteri perindustrian, dan GAIKINDO, mampu mendorong industri otomotif Indonesia untuk memasarkan produknya ke dalam negeri, GAIKINDO (Gabungan Industri Otomotif Indonesia) juga bergabung bersama

pemerintah dalam promosi di bidang industri otomotif salah satunya dalam acara internasional yaitu GIIAS dan IIMS di mana dalam acara ini menampilkan mobil-mobil dengan teknologi modern yang mampu meningkatkan inspirasi masyarakat terhadap perkembangan dunia otomotif serta melakukan ekspor ke berbagai negara (Siregar, 2019). Pemerintah bersama dengan menteri-menterinya mampu mengembangkan industri 4.0. yaitu industri kimia, tekstil, makanan dan minuman, elektronik, dan salah satunya adalah industri otomotif, yang dalam ekspornya sudah tinggi dan memiliki teknologi yang modern, strategi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini mampu membuka akses pasar yang lebih besar terhadap dunia Internasional.

Presiden Joko Widodo mendukung para pelaku bisnis dalam meningkatkan penjualan mereka salah satunya dalam bidang industri otomotif melalui kebijakan yang dikeluarkan dan dukungan melalui intensif yang mampu mempermudah industri otomotif dalam investasi, ekspor dan menurunkan impor, sebab industri otomotif sendiri merupakan pionir dari industri-industri yang ada di Indonesia serta menjadi industri penyumbang PDB terhadap negara dan menteri perindustrian sangat aktif untuk mendorong peningkatan usaha, investasi, transfer teknologi (kemenperin, 2019).

Awal tahun 2018 Indonesia memiliki masalah terhadap pengeksporan mobil ke negara Vietnam, dimana hal tersebut terhambat dikarenakan adanya

regulasi baru yang di keluarkan oleh Vietnam mengenai sertifikasi *Vehicle Type Approval (VTA)* untuk mobil bertipe *Completely Build Up (CBU)* dimana aturan tersebut diatur dalam *Decree No. 116/2017* dan *Circular No. 03/2018*. Kebijakan tersebut mengancam industri otomotif Indonesia yang mana membuat Presiden Joko Widodo merespon permasalahan tersebut dalam pertemuan bersama perdana menteri Vietnam yaitu Nguyen Xuan Phuc pada acara *IMF-World Bank Annual Meeting* dalam pembahasan penegakan hukum *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing* dan salah satunya adalah penghambatan ekspor mobil Indonesia ke Vietnam, dalam hal tersebut pemerintah Indonesia meminta agar ekspor mobil dari Indonesia dipermudah sehingga dalam kerjasama bilateral antara Indonesia-Vietnam yang sudah terjalin sejak lama kembali harmonis, Presiden Joko Widodo meminta PM Vietnam Nguyen Xuan Phuc untuk mengatur kembali persyaratan manufaktur perakitan, dan mobil utuh (CBU) yang dikirimkan ke Vietnam, dalam negosiasi atau pendekatan persuasif ini PM Vietnam menjanjikan akan menyelesaikan masalah tersebut selama dua bulan dan akan melakukan pertemuan ulang di Vietnam (CNN, 2018).

Mengenai ekspor mobil yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ke Vietnam telah mengalami hambatan. Maka dengan hal ini, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan keluhan kepada pemerintah Vietnam. Sebab Vietnam sendiri telah menerapkan regulasi yang membuat kendaraan yang

diimpor dari Indonesia tidak bisa ditransaksikan di Vietnam sendiri. oleh karena itu, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan hambatan ekspor kepada pemerintah Vietnam yang mana dari hal tersebut Presiden Joko Widodo memastikan dukungannya terhadap industri otomotif ini dapat terus bersaing (Daud, 2018).

- **Tokoh Menteri, dan politisi**

Dalam menjalankan pemerintahannya Presiden Joko Widodo dibantu dengan tokoh-tokoh menteri yang berkaitan erat dengan politisi dan pebisnis untuk dapat memasuki ranah politik dan ekonomi Indonesia guna meningkatkan pendapatan, tokoh-tokoh tersebut merupakan orang yang dipercaya oleh Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahannya hal ini pun bertujuan agar dapat meningkatkan kinerja kerja yang efisien, dan akuntabel. Dalam kabinetnya agar memudahkan arah kebijakan sehingga sejalan, Presiden Joko Widodo memilih orang-orang terdekatnya seperti Rini Mariani Soemarno yang dipilih sebagai menteri BUMN periode 2014-2019. Di mana sebelum menjabat sebagai menteri, Rini Soemarno memiliki pengalaman dalam menjabat sebagai Presiden Direktur PT. Astra Internasional, lalu PT. Semesta Citra Motorindo, PT. Agrakom, dan PT. Kanzen Motor Indonesia (Viva, 2019). Presiden Joko Widodo dengan Rini Soemarno sudah memiliki kedekatan secara politik dan ekonomi bahkan ketika Joko Widodo sendiri masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, kedekatan antara

pemerintah dengan tokoh pejabat lainnya yang memiliki peran di dua sisi yang berbeda ini memiliki hubungan yang erat untuk dapat membuat negara Indonesia mampu mengejar ketertinggalan dari negara lain. Keterkaitan pemerintah dengan orang-orang yang dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo, serta pebisnis yang memiliki kedekatan dengan pemerintah mampu membuat kebijakan yang sejalan dengan visi misi Indonesia kedepannya dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo memiliki peran dan pengaruh masing-masing dalam meningkatkan bidang yang mereka pimpin di mana kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan banyak memiliki pertentangan dalam struktur pemerintahan dalam negeri karena adanya kepentingan politik yang berbeda, namun dalam hal ini tokoh-tokoh tersebut mampu melaksanakan tugas mereka dengan baik dengan program yang mereka keluarkan seperti dalam kasus terhambatnya ekspor mobil ke Vietnam. Di mana menteri perindustrian bergerak cepat dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan cara berkoordinasi dengan menteri perhubungan, menteri perdagangan, menteri luar negeri, serta GAIKINDO untuk dapat mengkaji ulang SNI yang tidak sesuai dengan kriteria standar Vietnam yang mana hal ini mengakibatkan menurunnya angka penjualan mobil buatan Indonesia ke Vietnam (Jannah, 2018). Menteri-menteri yang menjadi wakil Indonesia terus melakukan komunikasi dengan otoritas Vietnam dalam menangani kasus yang

merugikan Indonesia sehingga permasalahan tersebut mendapatkan titik terang dan akses pasar ekspor mobil Indonesia kembali normal.

Menteri atau aktor elit memiliki kewenangan dan kepentingan terkait masalah yang akan dihadapi dalam membantu Presiden dengan menempatkan posisi yang tepat dalam kabinetnya serta memiliki nilai yang sejalan dengan pemerintahan. Di mana menteri tersebut harus mampu menjaga hubungan antara sesama menteri maupun Presiden (Isra, 2016). Mengenai respon kebijakan terhadap *Decree No.116/2017* dan *Circular No.03/2018* yang telah dikeluarkan otoritas Vietnam, peran menteri dalam hal ini memiliki kewenangan dan kepentingan dalam membantu tugas pemerintah untuk menindak lanjuti terhambatnya ekspor otomotif Indonesia sebab dalam meningkatkan industri otomotif kepentingan dari menteri terkait untuk menyikapi masalah tersebut sangat diperlukan untuk melanjutkan ekspor mobil Indonesia ke Vietnam karena banyaknya mobil-mobil Indonesia yang telah di ekspor ke Vietnam.

Peran menteri dalam menghadapi hambatan di bidang industri otomotif memiliki pengaruh yang begitu besar, sebab rancangan yang dikeluarkan oleh Presiden akan dikaji oleh menteri-menteri yang bersangkutan sehingga menciptakan peran yang signifikan terhadap strategi yang akan di jalankan. Dalam hambatan ekspor mobil ke Vietnam, kementerian perindustrian yang telah berkoordinasi dengan menteri-menteri lainnya memilih melakukan

pendekatan secara damai atau negosiasi dengan Vietnam guna menjaga stabilitas kedua negara. Kementerian yang turut andil dalam permasalahan ini menginginkan ekonomi Indonesia terus berjalan dalam melakukan perdagangan terhadap industri otomotif sehingga pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dukungannya terhadap industri otomotif terus berjalan tanpa adanya kendala dari kerjasama bilateral antara Indonesia-Vietnam. Peran menteri dalam hal ini sangat menentukan bagaimana arah tujuan perdagangan internasional khususnya dalam bidang ekspor mobil untuk terus bergerak cepat dalam melakukan dukungan yang signifikan terhadap industri otomotif sehingga dapat menyesuaikan kebijakan dan aturan-aturan yang baru terkait masalah terhambatnya ekspor mobil Indonesia ke Vietnam (Investments, 2018).

Dengan demikian, Kesenambungan antara pemerintah dengan tokoh-tokoh seperti menteri, dan politisi untuk dapat melancarkan kendala maupun visi dan misi Indonesia kedepannya dalam melakukan pembangunan negara, di mana pemerintah yaitu Presiden Joko Widodo yang memiliki *power* dan kedekatannya dengan tokoh-tokoh terkait seperti Rini Soemarno dan pihak swasta yaitu GAIKINDO memiliki keterkaitan yang erat dalam menjakankan politik dan ekonomi. Dalam pemerintahan era Presiden Joko Widodo bersama dengan menteri yang ditunjuk langsung merupakan bukti bahwa adanya keterkaitan politik yang berlangsung dalam pemerintahannya serta orang-orang

terdekat yang dipilih merupakan tim sukses dalam menjalankan roda pemerintahan meskipun adanya perbedaan politik dari kalangan lain.

Strategi pemerintah dalam menghadapi hambatan ekspor mobil ke Vietnam membuat kebijakan melalui intensif yang diberikan pada menteri-menterinya untuk membuat keputusan. Pemerintah yang telah berkoordinasi dengan menteri-menteri terkait dapat menyiapkan data-data pendukung dalam memproteksi sehingga mampu menyelesaikan masalah tersebut. Adanya kerja sama tersebut merupakan sarana dan prasarana penunjang pasar untuk mendorong ekspor industri otomotif dan dari kekuatan tersebut mampu menstabilkan pasar sehingga berjalan dengan baik.

Adanya hubungan yang erat antara pemerintah dan elit birokrasinya seperti menteri, sektor swasta dan organisasi merupakan ciri penting dari keberhasilan dalam meningkatkan ekonomi. Melihat bagaimana Presiden Joko Widodo yang telah bekerja sama dengan menteri-menterinya yaitu menteri perindustrian, menteri perhubungan, menteri perdagangan, menteri luar negeri, dan GAIKINDO memberikan hasil yang optimal untuk menyelesaikan masalah hambatan ekspor mobil ke Vietnam. Di mana pemerintah Vietnam telah merespon negosiasi yang di berikan oleh Indonesia dan akan menyelesaikan masalahnya dalam dua bulan. Hubungan yang erat antara pemerintah dengan aktor-aktor elit di Indonesia mampu menunjukkan kerja sama yang baik dalam melindungi pasar khususnya di bidang industri otomotif.

Pemerintah dan tokoh-tokoh tersebut bekerja sama dalam meningkatkan industri otomotif dalam segi keamanan dan kualitas untuk produk-produknya dengan menyesuaikan kebijakan dan regulasi. Dalam hal ini menggambarkan bagaimana keterkaitan antara pemerintah dan tokoh-tokoh yang bersangkutan mampu menunjukkan bahwa liberalisasi yang dijalankan sudah berjalan dengan baik sehingga mampu meningkatkan daya saing dan mempunyai pengaruh yang signifikan untuk mengatasi masalah terhambatnya ekspor mobil ke Vietnam.

Melihat permasalahan antara Indonesia-Vietnam mengenai terhambatnya ekspor mobil Indonesia ke Vietnam terkait *Decree No.116/2017* dan *Circular No.03/2018* membuat pemerintah Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo melakukan pendekatan secara persuasif agar kerjasama yang terjalin tetap terjaga. Di dalam permasalahan ini pemerintah mampu membuat strategi dan mengidentifikasi masalah sehingga dapat menentukan tindakan yang tepat untuk menentukan peluang dalam melaksanakan langkah kedepannya. Pemerintah juga mampu mendukung arah kepentingan nasional dengan melakukan pendekatan intensif terhadap elit birokrasi yang terhubung kepada pemerintahan pusat serta pihak swasta dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk dapat bersama-sama dalam melakukan pembangunan ekonomi negara.

2.2 Relative Autonomy of the Developmental State

Otonomi relatif memberikan kewenangan pemerintah dalam mengatur ekonomi dan politik di mana pemerintah dalam melakukan birokrasinya perlu adanya keterkaitan dengan pihak-pihak yang ada dalam struktur pemerintahan tersebut dalam menjalankan suatu negara. Selain itu pemerintah memiliki keterkaitan erat dengan pihak swasta, dan elitnya dalam menjalankan kerjasama, maupun masalah-masalah yang akan dihadapi kedepannya. Indonesia dalam masa kepemimpinan Joko Widodo memiliki kewenangan dalam mengatur birokrasinya namun hal tersebut memiliki batasan sehingga melakukan intensif terhadap kebijakannya dan di bantu elit birokrasinya dalam menentukan arah kebijakan.

- **Kapabilitas Intervensi Pemerintah Dalam Industri Otomotif Indonesia**

Dalam otonomi relatif ini menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara Demokrasi di mana Presiden merupakan kepala negara yang dibawah oleh UUD 1945, dalam merumuskan suatu kebijakan Presiden memerlukan persetujuan dari para menteri dan anggota legislatif, yudikatif, eksekutif, dan partai politik yang bersangkutan, namun dalam hal ini adanya perbedaan dan kepentingan politik setiap kelompok menghambat proses birokrasi yang berjalan sehingga memerlukan waktu yang sangat lama. Sehingga Presiden memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengatur industri otomotif, agar

dapat mempercepat proses birokrasinya Presiden memanfaatkan proses intensif terhadap bidang-bidang yang ingin di tingkatkan.

Industri otomotif pada masa pemerintahan Joko Widodo merupakan industri yang menjanjikan sebab dari industri otomotif mampu menyumbang ekonomi yang sangat besar terhadap negara Indonesia, pemerintah era Presiden Joko Widodo dalam industri otomotif berusaha meningkatkan penjualan dalam negeri maupun luar negeri, selain itu pemerintah juga berusaha dalam menekan impor, dan berusaha membantu industri otomotif dalam negeri bersama Menteri Perindustrian, menteri perdagangan, dan menteri keuangan, dimana pemerintah berusaha membuat kebijakan dalam menurunkan pajak seperti :

1. Tax Allowance

Dalam upaya menarik investor pemerintah membuat kebijakan dalam pajaknya salah satunya Adalah keringanan pajak yang diberikan kepada perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang dikenal dengan nama *Tax Allowance* perusahaan akan diberikan keringanan pajak (PPh) berdasarkan dalam jumlah investasinya sehingga pengurangan pajak tersebut berdasarkan penghasilan neto tertinggi 30% dari jumlah investasi yang telah dibebankan selama 6 tahun dimana pertahunnya akan dikurangi 5% hal ini telah diatur dalam kebijakna Nomor 89/PMK.010/2015, peringanan pajak ini akan menjadi prioritas pemerintah jika industri tersebut merupakan industri yang bernilai tinggi di nasional, dan mampu

menyerap tenaga kerja minimal 300 orang dan melakukan investasi minimal Rp. 50 miliar.

2. Tax Holiday

Pada penghilangan pajak sementara untuk pajak penghasilan (PPh) yang diberikan kepada perusahaan dengan jangka waktu 5-20 tahun yang tertuang dalam kebijakan Nomor 35/PMK.010/2018 bagi perusahaan yang melakukan investasi di Indonesia sehingga mampu meningkatkan ekonomi (PDB) *Tax Holiday* ini akan diberikan kepada perusahaan asing jika nilai investasinya tinggi maka penghilangan pajak tersebut juga akan sangat lama, hal ini mencakup segala bidang industri salah satunya adalah bidang otomotif (Keuangan, 2018).

3. Super Deductible Tax

Merupakan pengurangan pajak penghasilan (PPh) terhadap industri lokal yang melakukan kegiatan pengembangan, penelitian, dan pendidikan agar terus memberikan inovasi, investasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana industri lokal yang terlibat terutama yang melakukan ekspor seperti yang tertuang dalam revolusi 4.0 akan diberikan pengurangan wajib pajak hingga 300 persen terhadap industri lokal yang melakukan pengembangan tertentu maupun penelitian di Indonesia, dan terhadap industri yang memberikan fasilitas magang, dan pendidikan,

sehingga industri yang terlibat akan mengurangi beban dalam pembayaran badan usahanya (Setiawan, 2019).

Contohnya seperti perusahaan yang sedang memberikan pelatihan dan pendidikan terhadap alat-alat industri bersama dengan pihak yang bekerjasama seperti SMK dan menghabiskan total Rp. 1 miliar pemerintah akan mengurangi wajib pajak (WP) sebesar Rp. 2 miliar, hal ini bertujuan agar mampu menunjang sumber daya manusia, dan jika industri tersebut sedang membangun pusat riset (R&D) senilai Rp. 1 miliar pemerintah akan memberikan pengurangan pajak senilai Rp. 3 miliar selama 5 tahun, perusahaan yang terlibat juga akan di lihat dalam *Assessment* industri tersebut, hal ini bertujuan agar Indonesia mampu mempersiapkan SDM dan produk yang memiliki daya saing, meningkatkan ekspor, yang dapat memperbesar ekonomi nasional serta masuk kedalam jajaran 10 negara ekonomi yang kuat pada tahun 2030 (Kemenperin, 2019).

Pemerintah bersama dengan menteri keuangan memberikan kebijakan berupa kenaikan tarif bea masuk atau impor terhadap barang-barang yang sudah mampu di produksi oleh industri lokal seperti yang tertuang dalam aturan Nomor 132/PMK.010/2015, dalam peraturan tersebut mampu membuat industri lokal bersaing dan bertahan dari adanya produk-produk luar negeri. Hal ini mampu membuat industri-industri lokal meningkatkan produksi kandungan

lokal mereka sebab adanya kenaikan harga barang-barang impor ini membuat produk Indonesia lebih murah dan memiliki kualitas yang sama (Idris, 2015).

Untuk melindungi industri otomotifnya selain membatasi banyaknya barang-barang impor Presiden Joko Widodo menekankan kembali kebijakan terhadap Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi dan bukan barang kebutuhan pokok hal tersebut telah tertuang dalam pasal 8 Undang-Undang No.42 Tahun 2009 di mana tarif tersebut ditetapkan paling rendah 10-200%, hal ini diatur agar masyarakat yang berpenghasilan rendah memiliki keseimbangan untuk mengendalikan pola konsumsi dan memberikan perlindungan terhadap produsen kecil (Pajak, 2016). Mobil-mobil yang terkena pajak PPnBM akan dilihat dari segi emisi gas buang dan meliputi *Low Cost Green Car* (LCGC) sehingga mampu mendukung kemajuan industri otomotif Indonesia.

Low Cost Green Car (LCGC) merupakan sebuah program yang mengharuskan mobil-mobil di Indonesia memiliki mesin yang ramah lingkungan, hemat energi, hemat bahan bakar, dan berharga murah di mana mobil tersebut memiliki kapasitas mesin maksimal 1.200 cc, program tersebut merupakan program yang diberikan pemerintah dalam menjaga lingkungan serta menurunkan penggunaan BBM. Dalam hal ini pemerintah bertujuan untuk dapat meningkatkan industri otomotif Indonesia dengan teknologi yang tidak monoton di mana hal ini diharapkan pemerintah bahwa industri otomotif

mampu berinovasi dalam menciptakan teknologi terhadap komponen-komponennya tentunya komponen tersebut merupakan komponen buatan pabrik Indonesia. Di sisi lain dengan adanya program tersebut menimbulkan banyaknya komponen yang harus dipakai sehingga pabrik juga harus menyediakan stok komponen yang banyak sehingga akan memerlukan banyak tenaga kerja dan akan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga akan berdampak baik bagi negara dengan adanya penyamarataan ekonomi dan peningkatan di sektor perekonomian negara (perindustrian, 2019).

- **Kemampuan Intervensi Pemerintah Terkait Perdagangan Internasional**

Dalam menjaga keamanan terhadap perdagangan internasional pemerintah perlu melakukan sinergitas dengan berbagai pihak untuk melakukan penyesuaian regulasi dan mengatur standar produk terhadap perdagangan internasional. Selain kebijakan PPnBM yang telah direalisasikan untuk menjaga kestabilan dalam ekspor dan impor, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan penggunaan produk lokal yang telah memiliki standar SNI.

Kebijakan tersebut berlaku bagi investor yang ada di Indonesia seperti yang telah di atur dalam Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di mana 80% harus menggunakan kandungan lokal, namun hingga saat ini TKDN hanya diberlakukan pada mobil penumpang yang memiliki program LCGC yang telah diatur dalam peraturan menteri perindustrian Nomor: 16/M-

IND/PER/2/2011 tentang ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri (kemenhumkam, 2011).

Adapun kebijakan nasional Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan nilai perdagangan Indonesia bersama dengan menteri perhubungan adalah meningkatkan daya saing serta mengembangkan infrastruktur seperti memperbesar pelabuhan, airport, jalan tol, dan jalur kereta api. Sehingga jika infrastruktur memadai dapat membantu produk-produk Indonesia untuk bersaing di pasar global dan juga terdapat program kebijakan yang mampu ditingkatkan pemerintah seperti pariwisata, daya beli masyarakat, logistik, dan investasi, bersama dengan menteri koordinator bidang perekonomian (Parikesit, Purwoto, Soemardjito, & Susilo, 2019).

Dalam menghadapi perdagangan bebas dan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) serta persaingan yang ketat di wilayah ASEAN, Indonesia berupaya memberikan kualitas industri otomotif yang mampu bersaing dan mengejar ketertinggalan dari negara lain sebab industri otomotif Indonesia sudah berskala internasional dari produksi, branding, dan rantai pemasokan.

Hingga saat ini Indonesia banyak memiliki pabrik industri otomotif di mana pabrik-pabrik tersebut sudah memiliki teknologi yang modern untuk bisa mengisi pasar domestik dan memenuhi permintaan luar negeri.

Pemerintah yang telah berkoordinasi dengan kementerian perindustrian dan menteri perdagangan untuk melindungi industri lokal mengupayakan

peningkatan untuk di beberapa sektor. Dari tingkat regional ASEAN terdapat rencana MEA yang mampu meningkatkan perdagangan internasional antar negara anggotanya, dalam industri otomotifnya sendiri Indonesia yang telah siap dalam menghadapi MEA tersebut memberikan beberapa regulasi yang dapat mengamankan perdagangan internasionalnya seperti dalam meningkatkan tarif terhadap barang impor, dan pengetatan regulasi impor.

Pemerintah dalam menjaga konsumennya telah membentuk Direktorat Jenderal Standardisasi melalui peraturan menteri perdagangan No.57 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja kementerian perdagangan dengan misi meningkatkan daya saing ekspor, perlindungan konsumen, dan meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan Indonesia (Malau, 2014, pp. 173-179). Pemerintah juga telah bekerjasama dengan berbagai pihak seperti organisasi internasional WTO dalam melakukan perjanjian internasional dalam melindungi produk dan standar produk dari segi keamanan dan kualitasnya, dalam kesepakatan tersebut Indonesia dan WTO memiliki kepentingan strategis terkait politik dan hukum yaitu (Widayanto, 2016, pp. 4-13):

1. Hak Internasional atas Keterbukaan Ekonomi Pasar

UU No. 7 Tahun 1994 menyatakan bahwa Indonesia telah mengintegrasikan diri untuk melakukan perdagangan multilateral dan berupaya untuk memperluas, meningkatkan, dan mengamankan kepentingan Indonesia untuk berdaya saing dalam perdagangan Internasional, dalam melakukan perdagangan internasional juga memegang prinsip akan berlaku adil untuk produk pasar terhadap mitra dagangnya. Dalam perjanjian tersebut juga menjelaskan bahwa Indonesia berhak dalam memanfaatkan pasar dalam melakukan investasi, memiliki hak dalam mengisi pasar bagi sesama anggota WTO, dan memiliki hak dalam memanfaatkan sumberdaya negara pendatang untuk sumber kebutuhan ekspor.

2. Hak Melindungi Bangsa dari Ekses Negatif Perdagangan

Untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan Indonesia mampu membuat UU maupun kebijakan yang dapat melindungi negaranya dari kerjasama yang dilakukan dengan negara sesama anggota seperti perlindungan terhadap tarif dan non-tarif, dalam perlindungan tarif merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengamankan keperluan domestik dengan memberikan pajak terhadap beberapa barang sehingga dalam melakukan perdagangan impor Indonesia bisa meniggikan pajak tersebut dan mampu menetapkan bea masuk lebih tinggi sehingga membuat barang-barang dari produk dalam negeri memiliki harga yang murah dan mampu bersaing dengan barang-barang dari luar negeri dan perlindungan

untuk melindungi dari akses negatif dan ketentuan dalam melindungi industri nasional dengan cara mengimplementasikan standar keselamatan atas produk yang akan di jual dalam perdagangan internasional. Peran pemerintah untuk menyeimbangkan antara ekspor dan impor yang saat ini terus meningkat yaitu melalui cara diversifikasi ekspor dan menjual produk yang memiliki nilai tambah, sehingga pemerintah menekankan bahwa akan meningkatkan ekspor dengan cara mengintervensi yang optimal di beberapa bidang termasuk otomotif, pemerintah juga berusaha dalam mengatur pajak di Indonesia sebab hingga saat ini pajak yang ada dirasa masih sangat lemah, dalam melakukan ekspor jumlah barang dan jasa harus di perbanyak sebab jika impor terlalu banyak maka produksi dalam negeri akan menurun dan mengganggu stabilitas perekonomian.

3. Diplomasi Perdagangan

Pemerintah harus memiliki strategi dalam membuat kepentingan dan kebijakan untuk melindungi, pemanfaatan hak, dan mengamankan negara dari sumber daya luar negeri serta menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan, strategi pemerintah dalam melakukan diplomasi perdagangan terhadap politik luar negerinya bertujuan agar bisa memanfaatkan penunjang stabilitas terhadap pasar domestik dan luar negeri dan mendapatkan hukum yang jelas untuk menjaga perekonomian

negara dan mutu suatu produk melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan.

Pemerintah telah membuat Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) untuk menjaga produk-produk ekspor Indonesia sebagaimana telah diatur dalam UU No.7 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengamanan perdagangan agar tetap membuka produk ekspor Indonesia ke negara lain. Tugas dari DPP tersebut memberikan langkah-langkah yang signifikan terhadap ekspor Indonesia di mana mereka pada umumnya membantu ekspor ke negara yang bermasalah dengan cara bernegosiasi dan melakukan kunjungan langsung ke negara terkait, pemerintah juga bekerja sama dalam membuat standarisasi untuk memperkuat ekspor produk Indonesia di kancah internasional (Perdagangan, 2019).

Pemerintah dalam regulasinya terhadap produk Indonesia memiliki standar Internasional dari segi keamanan, dan kualitas dengan cara terus melakukan inovasi, pengawasan, dan perbaikan secara terus menerus melalui organisasi Badan Standardisasi Nasional (BSN). Di mana organisasi ini mewakili Indonesia dalam International Organization for Standardization (ISO) dalam mengatur standarisasi dunia terkait produk-produk umum seperti komponen otomotif dan memfasilitasi pasar internasional dalam produksi, manufaktur, dan pengembangan untuk menjamin keamanan suatu produk. Dalam hal ini standar yang ada di suatu negara juga harus wajib memiliki

standar yang menjadi acuan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Selain itu dalam mengatur standardisasi ini ISO telah bekerjasama dengan WTO dalam mengatur standar produk negara anggotanya, di tingkat ASEAN, BSN juga berperan aktif dalam mewakili Indonesia untuk melakukan kerjasama standardisasi seperti pada forum ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) untuk memperlancar kerjasama investasi dan perdagangannya dalam pengakuan standardisasi sehingga dapat menekan negara anggotanya untuk mengikuti kebijakan yang telah disepakati (BSN, 2017).

Pemerintah dengan negara lainnya juga perlu dalam menerapkan Mutual Recognition Agreement (MRA) untuk industri otomotif Indonesia sehingga untuk wilayah ASEAN memiliki standar yang sama sehingga memudahkan para pelaku bisnis dalam menjalankan industri otomotif tanpa adanya uji tipe terus menerus. Pemerintah harus menekan kebijakan tersebut terhadap industri otomotif Indonesia sebab banyaknya mobil buatan Indonesia yang di ekspor ke luar negeri di mana dalam MRA tersebut terdapat sertifikasi dalam memastikan kualitas, perlindungan terhadap produk kendaraan, dan keamanannya (Mola, 2019). Upaya ini membuat aktor yang terlibat menyetujui standar yang telah di tetapkan sebab sangat tingginya persaingan dalam industri otomotif, tentunya Indonesia dalam permasalahan terhambatnya ekspor mobil

ke Vietnam yang terjadi sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi dan menurunkan penjualannya.

Dengan demikian, negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi menjelaskan bagaimana pemerintah dan elit birokrasinya yang memiliki kewenangan dalam mengatur sektor-sektor yang ingin di tingkatkan termasuk bidang industri otomotif. Terlihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah adalah di dalam kebijakan pengembangan industri otomotif nasional serta dalam keikutsertaan di perdagangan internasional. Meski begitu, terdapat beberapa batasan kewenangan yang dimiliki, seperti pada perumusan kebijakan pengembangan industri otomotif domestik yang mana pemerintah tidak dapat memaksa secara langsung, namun melalui pemberian insentif serta penerapan pajak (*Tax Holiday, Tax Allowance, Super Deductible Tax*).

Pemerintah juga memiliki keterbatasan terhadap perdagangan internasional. Namun, di sini pemerintah masih dapat melakukan beberapa upaya seperti penyesuaian kebutuhan administratif domestik dengan standar internasional. Selain itu, pemerintah juga dapat mengirimkan delegasi untuk melakukan diplomasi perdagangan dengan negara lain, termasuk dalam kasus ini adalah Vietnam untuk menyelesaikan permasalahan perdagangan yang muncul antar kedua negara.

Terkait kasus terhambatnya ekspor mobil Indonesia ke Vietnam kewenangan pemerintah dalam melindungi perdagangan internasional beserta

industri otomotifnya memiliki kompleksitas yang beragam. Di dalam negeri pemerintah yang terhubung dengan elit birokrasinya harus bisa memiliki keinginan yang kuat serta kerja sama yang optimal untuk bersama-sama dalam meningkatkan sektor unggulan yang ingin dipasarkan. Namun akses yang begitu sulit dikarenakan adanya perbedaan kepentingan yang terjadi dalam lingkup pemerintahan, Presiden Joko Widodo banyak melakukan intervensi terhadap menteri-menteri yang bersangkutan. Dalam kerja sama bilateral antara Indonesia-Vietnam mengenai hambatan tersebut batasan wewenang pemerintah dalam melakukan diplomasi perdagangan dengan cara bernegosiasi dan mengikuti aturan dalam perjanjian-perjanjian internasional seperti WTO, negosiasi yang dilakukan pemerintah merupakan cara yang terbaik untuk menjaga hubungan antar sesama negara dalam menjaga stabilitas perekonomian dan perjanjian perdagangan internasional.

Keterbatasan wewenang ini yang membuat pemerintah terus mempertahankan kebijakan untuk dapat menopang pertumbuhan serta intensif terhadap industri otomotif untuk bertransformasi menjadi industrialisasi sebab industri otomotif Indonesia sendiri masih berbasis komoditas dan bernilai tambah rendah. Intensif tersebut bertujuan untuk mempercepat reformasi struktural, sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan, sehingga produk domestik mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri. Kebijakan seperti pajak dapat meningkatkan percepatan ekonomi dan stabilitas antara

ekspor-impor dan menarik investor, hal ini lah yang merupakan strategi untuk memperkuat daya saing guna menjadi basis produksi dalam memasok rantai nilai global, sehingga pemerintah mampu mendorong masyarakatnya termasuk pihak-pihak yang berwenang untuk terus bekerja sama dalam kebijakan yang ia keluarkan untuk meningkatkan industri otomotif Indonesia.

Terkait batasan kewenangan pemerintah dalam kebijakan pengembangan industri otomotif pada perdagangan internasional sangat menentukan bagaimana pemerintah dalam menjaga standar produk lokalnya agar bisa bersaing dengan produk-produk negara lain. Selain itu pemerintah yang telah bekerja sama dengan berbagai organisasi dan membentuk badan standar produk seperti BSN, DPP, merupakan cara pemerintah dalam menjaga kualitas, keamanan, serta berdaya saing dengan negara lain terhadap produk-produknya dan mengedepankan daya saing yang bernilai tinggi dalam bentuk transfer teknologi, produksifitas, inovasi, dan integrasi ekonomi global sehingga menciptakan lingkungan usaha yang kompetitif.

Dengan adanya keterangan di atas, pada bab 2 ini menjelaskan bagaimana *Developmental Elite* dapat terlihat bahwa kelompok elit birokrasi dan sektor swasta maupun organisasi memiliki kedekatan dengan sektor industri otomotif domestik. Oleh karenanya, pemerintah memiliki fokus lebih terhadap sektor ini. Hal ini dapat dilihat mulai dari Presiden Joko Widodo yang memiliki historis kedekatan dengan mobil ESEMKA, hingga beberapa menteri

yang memiliki relasi kuat dengan berbagai perusahaan otomotif nasional untuk meentukan arah kebijakan di industri otomotif. Meski begitu, di dalam menjalankan kebijakannya, elit pemerintahan juga terbentur dengan terbatasnya kewenangan yang dimiliki.

Di dalam kasus sengketa perdagangan dengan Vietnam, terlihat bahwa Indonesia tidak memiliki kewenangan dalam menekan kebijakan yang ada di negara tersebut. Yang dapat dilakukan Indonesia adalah dengan mengirimkan delegasi untuk melakukan diplomasi perdagangan untuk membantu mencari kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, sehingga produk otomotif Indonesia kembali dapat masuk ke pasar Vietnam.

Menteri yang merupakan delegasi untuk melakukan negosiasi atas perintah Presiden dalam melancarkan kerja sama bilateral antara Indonesia-Vietnam merupakan struktur dari terjalannya kerja sama dalam perdagangan internasional. Batasan ini menjelaskan bagaimana negara dalam menjaga hubungan terhadap perdagangan internasional, di mana pemerintah dan menteri-menterinya memiliki batasan tertentu untuk kewenangannya dalam meningkatkan produk-produk yang ada dalam pasar perdagangan internasional. Hal ini juga menjelaskan bagaimana pemerintah dan menteri-menterinya dalam melindungi industri-industri lokal memiliki batasan yang hanya dapat dilakukan dalam kewenangan suatu negara untuk dapat mendukung pasar di dalam perdagangan internasional maupun lingkup domestik.

BAB III

STRATEGI ELIT BIROKRASI DAN ORGANISASI DALAM MENYESUAIKAN REGULASI INDONESIA-VIETNAM DI BIDANG INDUSTRI OTOMOTIF

Pada bab III ini akan membahas mengenai strategi *Economic Bureaucracy: Power, Competence, Insulation and Penetration* dan *Developmental States and Civil Society*, di mana pada bab ini akan memfokuskan bagaimana proses strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaganya untuk dapat mengatasi hambatan ekspor mobil ke Vietnam. Serta bagaimana birokrasi yang berjalan dibawah oleh salah satu koordinator dalam meningkatkan industri otomotif. Penjelasan selanjutnya mengenai bagaimana peran pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya tanpa perlu mengkomunikasikannya terlebih dahulu kepada masyarakat, di sisi lain peran masyarakat dalam kasus ini sangatlah minim bahkan hampir tidak ada, selain itu pada bab ini akan menjelaskan aktor non-negara siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut.

1.1 *The Economic Bureaucracy: Power, Competence, Insulation and Penetration*

Untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, hadirnya elit birokrasi yang membantu pemerintah untuk menjalankan dan mengawasi suatu pasar agar mampu mengatur perekonomian sehingga pemerintah juga dapat

memfasilitasi pasar yang dilakukan oleh aktor swasta dalam memodernisasi negara. Untuk menopang peningkatan di industri otomotif, kementerian perindustrian merupakan pihak yang mengelola seluruh sektor yang berhubungan dengan industri. Selain itu dalam menghadapi hambatan ekspor mobil ke Vietnam, kementerian perindustrian selaku pihak yang bertanggung jawab dalam menjembatani komunikasi dengan kementerian lainnya untuk memecahkan masalah dan menjadi koordinator untuk membuat kebijakan dalam melancarkan kembali ekspor mobil ke negara Vietnam.

- **Peran kementerian perindustrian dalam menjalankan dan mengawasi strategi *Developmental State***

Economic Bureaucracy menjelaskan bagaimana birokrasi yang berjalan dibawah salah satu lembaga untuk dapat membantu pemerintah dalam menunjang perekonomian pasar, di mana nantinya lembaga tersebut akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya untuk dapat bekerja sama dalam mengatur strategi dan mengeluarkan kebijakan yang dapat membantu meningkatkan ekonomi.

1. Menteri perindustrian

keterlibatan lembaga dalam pertumbuhan ekonomi negara merupakan salah satu aktor yang penting dalam mengatur pihak-pihak lain untuk mengelola dan bertanggung jawab membantu pemerintah terhadap sektor industrinya. Untuk dapat melakukan pengembangan dalam memproduksi

industri otomotif Indonesia perlu adanya konsistensi yang jelas serta mempelajari ilmu yang mendalam agar mampu meningkatkan ekonomi dan kemajuan terhadap industri otomotif itu sendiri. Hal ini juga akan menggambarkan bagaimana peran pemerintah dalam menjalankan strateginya untuk menjalin hubungan antar negara seperti dalam hal transfer teknologi yang di bantu oleh menteri-menterinya dalam melakukan birokrasi dan membuktikan peranan mereka untuk kemajuan teknologi di industri otomotif (Chalmers, Jobhaar, & Arini, 1996, pp. 126-128).

kementerian perindustrian merupakan lembaga yang mengoordinasi menteri-menteri lainnya dalam meningkatkan industri otomotif. Di mana dalam hal ini Kebijakan yang dikeluarkan kementerian perindustrian merupakan kebijakan yang paling penting karena dalam industri otomotif melakukan aktivitas langsung untuk memenuhi permintaan pasar serta meningkatkan kualitas bahan baku dari dalam negeri dan meningkatkan kapabilitas pabrik agar menghasilkan produk yang berkualitas serta mengurangi impor (Dewayana, Sugiarto, & Hetharia, 2012, p. 5).

Kementerian perindustrian dalam meningkatkan ekspor serta daya saing yang kuat mengembangkan industri komponen dalam negeri (TKDN) dan sektor industri kecil-menengah (IKM) untuk menyiapkan komponen sehingga menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasar global. Kemenperin juga membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan seperti peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 terkait PPnBM agar dapat meningkatkan

ekspor otomotif dalam memasok kebutuhan domestik dan luar negeri. Kementerian perindustrian memberlakukan peraturan baru untuk meningkatkan investasi dan peningkatan produksi yang mencakup hemat bahan bakar, ramah lingkungan, harga yang terjangkau, dan dari segi keamanannya, di mana kemenperin melakukan regulasi baru terhadap peraturan menteri perindustrian Nomor 59 Tahun 2010. Di sisi lain kemenperin juga bekerja sama dengan berbagai pihak seperti SMK dan universitas dalam program pendidikan vokasi industri, serta membuat kegiatan dalam menyiapkan tenaga kerja industri tersertifikasi sebanyak 1.040.552 orang pada periode 2017-2019 untuk dapat mempercepat implementasi industri 4.0. yang strategis serta terintegrasi (Satya, 2018, pp. 21-23).

Untuk mendorong tercapainya program industri 4.0. kemenperin merealisasikan industri otomotif untuk bisa membuat manufaktur otomotif yang rendah emisi seperti kendaraan LCEV (Low Carbon Emission Vehicle), LCGC (Low Cost Green Car) dan membantu pemerintah dalam menyiapkan pengembangan industri otomotif dengan berbagai fasilitas dan insentif seperti menerapkan digitalisasi untuk mendukung perkembangan teknologi sehingga dapat mencapai target dengan memproduksi 1,5 juta unit mobil pada tahun 2020 dan kendaraan berbasis energi listrik yang di targetkan pada tahun 2025. Manufaktur terkait industri otomotif sangat mempengaruhi kualitas pabrikan mobil buatan Indonesia sehingga perlunya peningkatan terkait standarisasi, SDM & produktivitas, pelatihan manajemen, pengembangan produk teknologi

& inovasi, magang, dan *workshop*, serta keterampilan teknis sehingga nantinya peluang dan prospek untuk menjadi basis produksi dalam komponen otomotif Indonesia mampu menguasai pasar ASEAN (Hendra S, 2017, pp. 40-48).

Banyaknya kebutuhan yang perlu di siapkan untuk dapat meningkatkan industri otomotif dalam membuat teknologi digital yang terus berkembang hingga sekarang, kementerian perindustrian selalu berkomitmen untuk menciptakan SDM yang mampu bersaing dan berinovasi. Langkah-langkah kementerian perindustrian untuk dapat membantu pemerintah dalam menyiapkan masyarakatnya yang kuat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti negara Swiss dalam menjalin kerja sama terkait pendidikan vokasi industri yang bernama S4C (The Skill For Competitiveness), dalam kerja sama tersebut pemerintah Swiss memberikan bantuan senilai Rp 110 miliar dan bantuan pelatihan untuk kementerian riset, teknologi, sekolah vokasi kementerian perindustrian, pendidikan, serta SMK dan politeknik, dalam aktivitas perkuliahan, penambahan kurikulum, pelatihan dalam praktik dan teori, terkait teknik robotik, ototronik, audio dan video yang sangat dibutuhkan dalam industri otomotif Indonesia sehingga nantinya mampu memperluas lapangan pekerjaan, dan pasar global (Reistekdikti, 2018).

Kementerian perindustrian juga menjembatani pemerintah dalam melancarkan kembali ekspor mobil ke negara Vietnam yang sempat terhambat oleh kebijakan baru yang dikeluarkan pada 1 Januari 2018 terkait *Decree*

No.116/2017 dan Circular No.03/2018, di mana industri otomotif Indonesia khususnya mobil bertipe CBU menghentikan penjualan terkait perizinan untuk pasar Vietnam karena adanya perbedaan persyaratan standar VTA Vietnam dengan standar SNI milik Indonesia. Kementerian perindustrian harus bisa melindungi industri otomotif dan menjadi koordinator bagi menteri-menteri lainnya guna menjaga pasar domestik, dan membahas tentang persyaratan dan sertifikasi yang harus sesuai dengan VTA Vietnam sehingga ekspor otomotif berjalan normal kembali (Hamdani, 2018).

2. Kementerian Perdagangan

Kementerian perdagangan merupakan salah satu aktor yang membantu pemerintah dalam melakukan perdagangan domestik maupun internasional untuk sektor industri salah satunya adalah industri otomotif. Fokus dari kementerian perdagangan adalah untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap pemasukan ekonomi, arus barang ekspor-impor, dan kerja sama dengan berbagai pihak. Kementerian perdagangan juga memberikan dukungan kepada BSN, DPP, dalam mengatur standar produk Indonesia menjadi standar internasional untuk dapat bersaing dengan produk-produk negara lain.

Kementerian perdagangan mengatur regulasi yang dapat sejalan dengan pemerintah untuk memperkuat ekonomi dan menambah pendapatan PDB negara tentunya dengan keterlibatan lembaga-lembaga lainnya. Kementerian perdagangan selaku aktor yang melakukan kerja sama perdagangan domestik

dan internasional dalam menjalankan perannya mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk luar negeri untuk menjaga kestabilan dalam lingkup eksternalnya terlebih lagi dalam ketergantungan Indonesia terhadap barang-barang impor (Ratnaningsih, 2015, pp. 63-64).

Kementerian perdagangan Republik Indonesia terhadap bidang otomotif khususnya mobil merupakan bidang industri yang permintaan di pasar domestik maupun luar negeri selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kementerian Perdagangan memiliki tugas dalam mengamankan perdagangan Indonesia agar ekspor produk Indonesia terus terbuka ke negara lain, hal ini tertuang dalam UU No. 7 tahun 2014. Kementerian perdagangan juga berperan dalam memposisikan Indonesia untuk bernegosiasi, diplomasi, dalam forum regional, maupun bilateral, dimana artinya hal ini mencakup aspek-aspek ekonomi, politik, budaya, keamanan, dan sosial. (Arifin, Supriyanto, Kusnadi, Repa, & Lamria, 2018, pp. 7-17).

Untuk kelancaran ekonomi, kementerian perdagangan membantu dalam memfasilitasi pasar melalui strategi yang dikeluarkan untuk memperbesar dan melindungi industri-industri yang terkait. Dari industri otomotif dari tahun 2014-2018 banyak mengalami peningkatan meskipun awal tahun 2018 mengalami kendala ekspor mobil ke Vietnam. Tercatat sejak tahun 2014 jumlah ekspor mobil bertipe CBU mencapai sekitar 202,3 ribu unit, 2015 mencapai 207,7 ribu unit, 2016 mengalami penurunan mencapai 194,4 ribu unit, 2017

mencapai 231,2 ribu unit, 2018 264,6 ribu unit (Katadata, 2019). Kementerian perdagangan dalam membantu industri otomotif Indonesia guna memperlancar ekspor mobil ke Vietnam dibantu oleh berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah tersebut, terlebih lagi kementerian perdagangan membuat peraturan yang memudahkan negara-negara lain dalam melakukan kerja sama dengan Indonesia dan mengembangkan perdagangan internasional untuk memberikan dampak positif dalam menjaga keseimbangan perekonomian dunia (kemendag, 2019).

Dalam peraturan baru yang telah di keluarkan oleh pemerintah Vietnam mengenai persyaratan perakitan, manufaktur, impor kendaraan serta jaminan perdagangan jasa dan pemeliharaan motor, serta keamanan teknis dan lingkungan, Oke Nurwan selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri telah memberikan konsultasi teknis terhadap pemerintah Vietnam untuk mempercepat proses regulasi terkait aktivitas ekspor mobil Indonesia yang sempat mengalami kendala terkait perizinan dan segera di pulihkan dan kembali terbuka. (Primadhyta, 2018).

3. Menteri Perhubungan

Menteri perhubungan juga merupakan pengakses jalur untuk kelancaran ekonomi negara. Menteri perhubungan membuat tol laut dan udara agar memudahkan transportasi logistik dan menurunkan komoditas. Hal tersebut juga bertujuan agar masyarakat dan roda pemerintahan terus berjalan dan stabil

sehingga memudahkan perdagangan, ekonomi, dan industri-industri lainnya termasuk ekspor dan impor (perhubungan, 2019). Dengan adanya infrastruktur yang memadai wilayah-wilayah terpencil akan mudah dicapai dan membuat masyarakat serta bisnis-bisnis yang ada di Indonesia semakin berkembang. Pemerintah juga bekerja sama dengan pihak swasta seperti Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) agar meningkatkan kemampuan negara dalam menyediakan sarana/prasarana yang setiap tahunnya selalu meningkat.

Dalam meningkatkan nilai ekspor, perlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak, dalam menguatkan kerja sama antara pelaku usaha, pelabuhan, maupun menteri yang terkait perlu adanya sinkronisasi terkait komoditi jadwal, ruangan kapal, dan muatan dan menggunakan asuransi dari Indonesia maupun angkutan laut Indonesia sehingga pelaku bisnis yang ada di Indonesia dapat bersaing secara kondusif. Hal ini juga memudahkan pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang diperlukan untuk dapat meningkatkan ekspor (Publik, 2018).

Kementerian perhubungan dalam kasus terhambatnya ekspor mobil Indonesia ke Vietnam memiliki peran dalam mendukung industri otomotif seperti melakukan diplomasi dengan pemerintah Vietnam dengan cara menjelaskan bagaimana proses uji emisi dan teknologi yang dimiliki Indonesia melalui data-data untuk uji tipe kendaraan yang ada di Indonesia yang telah

memiliki sertifikasi internasional dalam keselamatan dan emisi, (Supriyanto, 2018).

4. GAIKINDO

Kementerian perindustrian juga bekerja sama dengan pihak swasta seperti GAIKINDO dalam membantu pemerintah dalam penjualan otomotif domestik dan luar negeri untuk kebutuhan ekonomi negara. Dalam bidang ekspor, Indonesia dibantu oleh GAIKINDO untuk meningkatkan pasar ekspor khususnya mobil, di mana GAIKINDO juga dapat mengatur permasalahan yang terkait hambatan ekspor mobil dengan negara Vietnam untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan diplomasi dengan pemerintah Vietnam agar masalah yang dihadapi akan segera teratasi dan *volume* mobil yang akan di ekspor ke Vietnam tidak menurun yang diperkirakan kehilangan ekspor 20% dari total 50 ribu unit mobil yang dikirim ke Vietnam. (Reily & Ekarina, 2018).

GAIKINDO sendiri cukup aktif dalam bekerja sama dengan pemerintah untuk menentukan arah kebijakan dengan kemampuan industri otomotifnya yang semakin kompetitif dan struktur manufakturnya semakin banyak.

GAIKINDO membantu pemerintah dalam berbagai hal untuk membantu negara agar dapat bersaing di pasar global khususnya persaingan di Asia Tenggara yang semakin besar, hal ini menggambarkan bagaimana komunikasi dan kerja sama yang terjalin hingga saat ini semakin baik. GAIKINDO juga membantu pemerintah dalam penjualan mobil buatan Indonesia ke beberapa

negara seperti Vietnam, Myanmar, Laos, Bangladesh, Qatar, Peru, Bahrain (Gaikindo, 2018)

GAIKINDO memiliki peran yang positif untuk pertumbuhan ekonomi negara dalam bidang otomotif khususnya mobil dengan cara meningkatkan ekspor serta memfokuskan dalam membuat mobil SUV (Sport Utility Vehicle) dan sedan, karena hingga saat ini Indonesia dalam industri otomotifnya hanya berfokus dalam pembuatan mobil MPV (Multi Purpose Vehicle) (Rudi & Ferdian, 2018). Banyaknya investasi yang mendukung industri otomotif di Indonesia memberikan perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan produk buatan Indonesia seperti pabrik mesin dan pabrikan komponen, dan peningkatan SDM & penguasaan teknologi, serta manajemen industri otomotif (Julianto, 2016). Untuk dapat menjadi industri otomotif yang mampu bersaing di ASEAN, dalam memproduksi mobil Indonesia harus mampu memvariasikan produknya untuk dapat menarik minat pasar global.

5. Kementerian Luar Negeri

Dalam melakukan diplomasi Kementerian Luar Negeri sangat dibutuhkan untuk menyambung hubungan yang dilakukan pemerintah. Hal ini juga memudahkan pemerintah untuk memberikan peran strategis untuk melakukan pembangunan ekonomi di berbagai negara dan memudahkan perdagangan luar negeri. Kemenlu juga berada pada posisi garda terdepan untuk membantu negaranya dalam menyelesaikan masalah maupun promosi

ekspor dan investasi (Kurniawan A. , 2014, pp. 257-259). Kemenlu menggunakan pendekatan dengan cara berdiplomasi untuk melancarkan kebijakan luar negeri Indonesia sehingga tujuan nasionalnya tercapai, di mana kemenlu membantu diplomasi antara negara-negara, perusahaan-perusahaan, maupun negara-perusahaan untuk melakukan diplomasi ekonomi terkait barang, jasa, produksi, tenaga kerja, dan investasi (Suropati, Montratama, & Sulaiman, 2018, pp. 232-237).

Peran Kemenlu dalam mengatasi hambatan ekspor mobil ke Vietnam adalah untuk mendukung pemerintah Indonesia sebagai mediator dalam menjalankan industri otomotif, Kemenlu yang telah berkoordinasi dengan menteri-menteri lainnya serta pihak swasta yaitu GAIKINDO memiliki hubungan internal yang sangat baik sehingga mampu membantu pemerintah dalam melancarkan kebijakannya. Terlihat bagaimana Kemenlu mampu melakukan diplomasi dan negosiasi terhadap pemerintah Vietnam yang akan memberikan solusi yang sama-sama menguntungkan untuk kedua negara terkait regulasi *Decree No.116/2017* dan *Circular No.03/2018*, Kemenlu juga bertugas agar dapat mengawasi dan membuka hambatan akses pasar ekspor mobil karena Vietnam sendiri merupakan pasar ekspor mobil yang paling utama bagi Indonesia.

Pada tahun 2019 Duta Besar RI Hanoi yaitu Ibnu Hadi mengharapkan ekspor mobil Indonesia ke Vietnam dapat menembus USD 600 juta sebab dari

tahun ke tahun kerja sama Indonesia-Vietnam selalu mendapatkan tren positif, pada periode Januari-April 2019 Indonesia sudah mampu mengekspor mobil sebanyak 12.723 unit senilai USD 190 juta, kerja sama Indonesia-Vietnam tersebut memberikan kenaikan perdagangan terhadap industri otomotif dalam memasok suku cadang dan komponen otomotif. Untuk dapat terus mendorong kerja sama antara Indonesia-Vietnam kedubes RI selalu menjalankan komunikasi dengan otoritas Vietnam untuk terus menjaga hubungan baik dan terus mendorong kenaikan investasi maupun kerja sama terhadap perusahaan di bidang industri otomotif (Kemlu, 2019).

Dengan demikian, adanya koordinasi dari pemerintah terhadap menteri dan pihak swasta yaitu GAIKINDO memudahkan jalannya birokrasi yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut dalam menjalankan, mengatur maupun menentukan arah kebijakan terhadap industri otomotif Indonesia. Birokrasi yang berjalan melalui lembaga-lembaga tersebut mampu melakukan kerja sama dalam menunjang perekonomian dan memfasilitasi pasar dan membantu negara dalam memodernisasi Industri-industri terkait sehingga mampu bersaing di pasar global.

Kementerian perindustrian berperan dan mengontrol industri otomotif untuk memperlancar produktivitas serta meningkatkan teknologi dan menjual ke dalam pasar domestik maupun luar negeri. Selain itu, dengan ikut sertanya peran pemerintah bersama dengan menteri dan pihak swasta mampu menarik

investor asing agar dapat mengembangkan ekonomi Indonesia dan dapat bersaing di dunia internasional, sehingga dapat meningkatkan percepatan arus ekonomi. Kemudian melihat strategi presiden Joko Widodo dalam mengembangkan ekonomi Indonesia tidak hanya dilihat dari satu sisi melainkan di berbagai bidang seperti infrastruktur yang memadai dan revolusi di bidang Industri sehingga hal ini membuat akses roda ekonomi negara dan masyarakat dapat meningkatkan penjualan di Indonesia.

Keterkaitan antara pemerintah dengan kementerian perindustrian, kementerian perdagangan, kementerian perhubungan, GAIKINDO, dan kemenlu mampu menentukan arah dalam menghadapi hambatan ekspor mobil ke Vietnam melalui bidangnya masing-masing, hal ini menjelaskan bagaimana terjalinnya hubungan yang baik antara pemerintah dengan kementerian serta organisasi dalam memajukan industri otomotif nasional. Hubungan tersebut menjelaskan bahwa komunikasi di dalam birokrasi yang berjalan sudah terkoordinasi dengan baik untuk memajukan industri otomotif nasional dan meningkatkan ekonomi Indonesia.

3.2 Developmental States and Civil Society

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah lebih melibatkan aktor-aktor yang berada dalam industri otomotif seperti pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan dalam distribusi, dan promosi. Sehingga membuat masyarakat tidak memiliki peran

yang signifikan untuk membantu pemerintah bahkan untuk ikut serta dalam merumuskan kebijakan, masyarakat di tujukan hanya untuk menikmati pasar yang diberikan. Partisipasi masyarakat terkait kasus ini mengidentifikasi bahwa proses yang di jalankan oleh pemerintah sangatlah minim karena tidak memiliki kekuatan untuk membantu pemerintah dalam keterlibatannya di pasar global.

Perkembangan pembangunan negara tidak lepas dari konteks sosial-ekonomi antara pemerintah dan masyarakat sipil, sebab masyarakat banyak memberikan tuntutan-tuntutan untuk meningkatkan pembangunan suatu negara. Melihat bagaimana negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi tentunya tidak terelakan bahwa masyarakat turut serta dalam membantu pemerintah untuk dapat memodernisasi negaranya, namun pemerintah dalam meningkatkan ekonominya tidak mampu membangun ekonomi sendiriaan sehingga perlu adanya bantuan seperti sektor swasta dan menimbulkan kekuatan sosial-politik dalam memfasilitasi pemerintah (Budiman, 2006, pp. 3-8).

Partisipasi masyarakat terkait kasus ini mengidentifikasi bahwa proses yang di jalankan oleh pemerintah sangatlah minim bahkan bisa dikatakan tidak ada sebab kebijakan yang di jalankan oleh pemerintah lebih memilih menteri-menteri yang terkait dan organisasi yang terjun langsung seperti GAIKINDO dalam meningkatkan ekonomi khususnya terhadap industri otomotif. Rancangan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih mengarah kepada kebutuhan industri otomotif sehingga masyarakat umum tidak dapat berpartisipasi dalam

merancang kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri, mengingat bahwa setiap pembuatan kebijakan selalu terpusat pada pemerintah namun nantinya dari kebutuhan industri otomotif akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

GAIKINDO merupakan organisasi swasta yang memfasilitasi pemerintah dalam manufaktur industri otomotif dari komponen hingga produsen, GAIKINDO merupakan organisasi yang sangat berpengaruh bagi Indonesia sehingga pemerintah terus meningkatkan hubungan guna langkah dalam membangun industri nasionalnya. Pemerintah mempercayai GAIKINDO dalam melakukan distribusi, promosi, maupun pengembangan industri otomotif. GAIKINDO sangat berperan aktif bagi pemerintah dalam memberikan masukan-masukan yang diperlukan dalam merumuskan kebijakan maupun program yang sesuai untuk kedepannya (Atmoko, 2016). Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, GAIKINDO menyelenggarakan acara GIIAS yang berlangsung setiap tahun, acara tersebut memberikan masyarakat pengetahuan dalam perkembangan teknologi dunia yang diaplikasikan kedalam kendaraan bermotor (Satriawan & Yuliana S.T., M.S.M., 2016, pp. 2961-2967).

Dengan demikian, GAIKINDO memberikan nasihat untuk pemerintah dalam merancang strategi terhadap kebijakan yang ada di dalam pasar global untuk memenuhi kebutuhan negara khususnya di dalam industri otomotif. Selain itu elit birokrasi yang berhubungan dengan pemerintah di mana masing-masing aktor

memiliki pengurus yang bekerja dalam bidangnya untuk melakukan peningkatan produksi, penjualan, ekspor-impor, dan investasi terkait isu maupun persaingan tanpa keterlibatan masyarakat. Sebab masyarakat sendiri tidak memiliki kekuatan untuk membantu pemerintah dalam keterlibatannya di pasar global sehingga masyarakat umum hanya bisa menerima hasil dari kesepakatan pemerintah dengan elit birokrasi beserta pihak swasta tersebut tanpa memiliki peran yang jelas.

Aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan industri otomotif dalam produksi, riset dan komponen di Indonesia sangat berpengaruh bagi pemerintah untuk dapat memberikan masyarakat umum kekuatan baru dan pendidikan yang tinggi guna menciptakan negeri yang maju dengan segala aspek yang mencakup teknologi dan pengetahuan yang dapat dirancang untuk Indonesia kedepannya. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dikeluarkannya kebijakan terkait industri 4.0. mempengaruhi semua kalangan dalam mengkonstruksi pembangunan guna meningkatkan ekonomi dan kekuatan Indonesia khususnya terhadap masyarakat yang lebih baik.

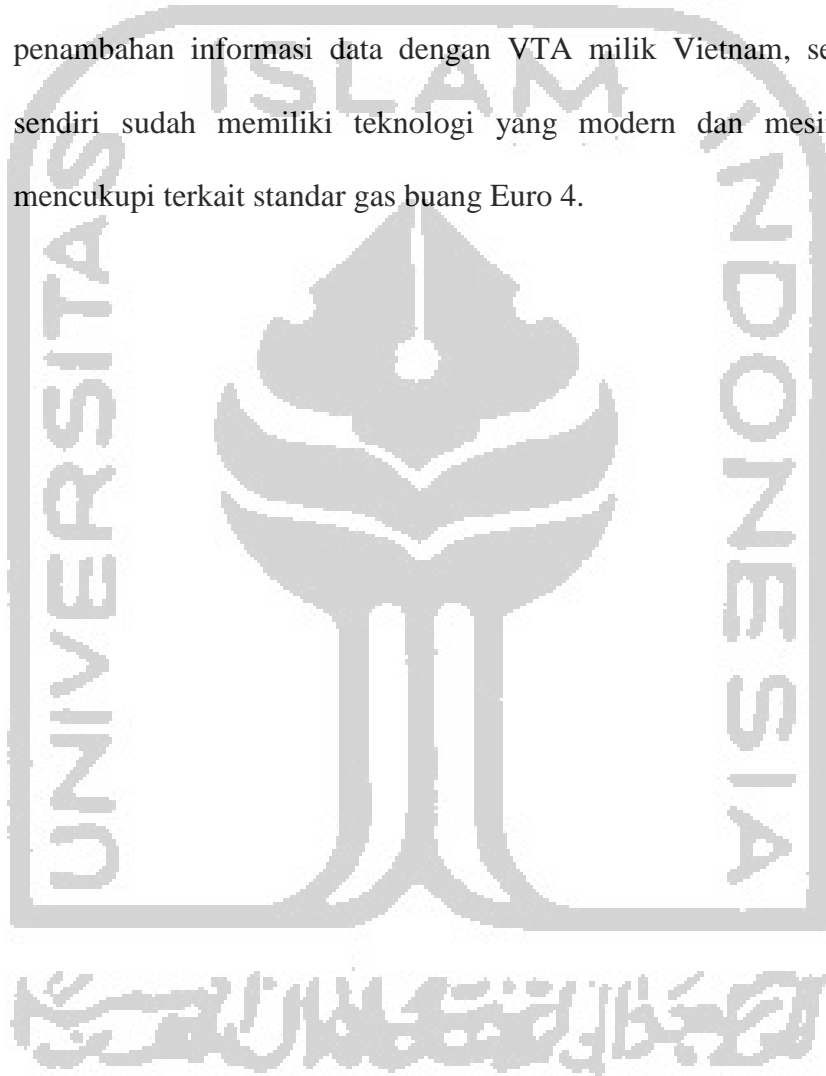
Peran GAIKINDO dalam kasus ini tidak memiliki peran yang lebih seperti dalam membuat kebijakan, namun GAIKINDO hanya memiliki peran dalam memberi nasihat, memberikan arahan kepada pemerintah untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan kondisi industri otomotif. Selain itu peran masyarakat yang sangat minim dalam mengikuti perkembangan dan isu terkait industri otomotif ditutupi oleh elit birokrasi yang lebih di percayai pemerintah guna

merumuskan strategi kebijakan industri otomotif di pasar global karena kurangnya *power* masyarakat terkait kebutuhan industri otomotif. Pemerintah dan elit birokrasinya dalam mengkontruksi pembangunan lebih memfokuskan kegiatan yang lebih dominan terhadap sektor yang ingin dikembangkan di mana dari kedekatan pemerintah dan aktor yang terkait mampu memberi masukan, meningkatkan komponen industri, penjualan, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan konsumsi domestik, serta melakukan kegiatan pengembangan dan penelitian dalam memproduksi mobil global yang lebih optimal dan pembangunan dapat berjalan lebih fokus.

Hadirnya GAIKINDO mampu membuat *civil society* menerima hasil dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan elit birokrasinya untuk kemajuan teknologi dan pendidikan, serta lapangan pekerjaan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat umum. Kebijakan yang di keluarkan pemerintah beserta elit birokrasi yang di percayai mengasumsikan bahwa hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya tidak diperhatikan dalam dunia industri otomotif.

Dengan demikian, Kerja sama dan terjalinya komunikasi yang baik antara pemerintah beserta TIM DELRI (Delegasi Republik Indonesia) yaitu kementerian luar negeri, menteri perdagangan, menteri perindustrian, menteri perhubungan dan GAIKINDO terkait diplomasi dengan otoritas Vietnam untuk melancarkan kembali ekspor mobil mendapatkan hasil yang positif berkat adanya negosiasi yang sama-sama menguntungkan untuk ke dua negara. Di

mana Indonesia melakukan pemulihan aturan dan menyetujui bagaimana persyaratan aturan Vietnam terhadap *Vehicle Type Approval* (VTA) yang harus mengikuti persyaratan dari uji tipe, dan kelayakan untuk mobil bertipe *Completely Build Up* (CBU) dan hanya melakukan penyesuaian dan penambahan informasi data dengan VTA milik Vietnam, sebab Indonesia sendiri sudah memiliki teknologi yang modern dan mesin yang sudah mencukupi terkait standar gas buang Euro 4.



BAB IV

STRATEGI PEMERINTAH DAN SEKTOR SWASTA INDONESIA DALAM MEMENUHI PERSYARATAN INTERNASIONAL TERKAIT INDUSTRI

OTOMOTIF

Pada bab ini akan menjelaskan bagaimana *Developmental States and Economic Interests* di mana pemerintah yang memiliki kekuatan politik dalam menjalankan strateginya melakukan kebijakan dengan cara memaksa dalam mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan bagaimana industri otomotif dapat memenuhi persyaratan dan kelayakan produk seperti pengujian, sertifikasi dan administrasi sebelum menjual produknya sehingga sesuai dengan standar internasional, hal ini merupakan pondasi awal dalam meningkatkan ekonomi meskipun merugikan aktor-aktor tersebut dan langkah dalam menyesuaikan kebutuhan untuk ekspor ke Vietnam yang mengalami kendala terkait *Decree* No.116/2017 dan *Circular* No.03/2018.

1.1 *The Effective Management of Non-State Economic Interests*

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerintah mampu mempertegas kebijakan-kebijakannya meskipun dengan cara memaksa. Pemaksaan tersebut bertujuan untuk mengatur sehingga mampu fokus dalam mengejar ketertinggalan dari negara lain, pemaksaan yang di berikan pemerintah justru memberikan kerugian kepada perusahaan sebab adanya

perbedaan kepentingan ekonomi. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, pemerintah melakukan paksaan terhadap industri otomotif untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan produksi maupun penjualan di pasar internasional serta mengembalikan ekspor mobil ke negara Vietnam dengan cara menyesuaikan regulasi terkait pengujian, sertifikasi, dan administrasi.

- **Penyesuaian standar kelayakan dengan standar Internasional**

Untuk memenuhi standar internasional dalam bentuk persyaratan dan kelayakan produk seperti pengujian, dan sertifikasi, pemerintah melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan industri otomotifnya dengan langkah strategis, yaitu melakukan peningkatan pada sumber daya manusia yang Profesional dengan kemampuan bersifat *multi talent* dan *disruptive* untuk dapat menciptakan pasar yang lebih besar dalam meningkatkan industri otomotif Indonesia. Kesiapan ini merupakan langkah awal dalam meningkatkan SDM terutama individu-individu yang keahliannya dapat dikembangkan yang akan mampu berdaya saing terhadap produktifitas komponen industri otomotif dengan pengetahuan yang lebih besar, sebab dengan keterampilan yang mereka tingkatkan akan menyelesaikan masalah-masalah yang akan dihadapi kedepannya.

Melihat bagaimana perkembangan teknologi yang semakin canggih hingga sekarang, peningkatan SDM sangat berpengaruh dalam transfer

teknologi di mana banyak pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan oleh mesin maupun robot sehingga keterampilan SDM yang ditingkatkan mampu berperan aktif (Salim , 2019, pp. 25-29).

Peningkatan SDM yang telah memiliki sertifikasi berlevel internasional merupakan persyaratan wajib yang harus dimiliki. Hal ini telah diperhatikan oleh kementerian perindustrian untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan industri otomotifnya melalui Institut Otomotif Indonesia (IOI) dalam pengembangan teknologi dan tenaga ahli seperti melakukan kerja sama dengan universitas untuk dapat berperan dalam membantu industri otomotif melalui penelitian, inovasi dan kreasi sehingga dapat bersaing dengan negara-negara lain khususnya di ASEAN. Hingga saat ini negara-negara tersebut terus bersaing untuk dapat menguasai pasar terkait industri otomotif (Kurniawan A. , 2016).

Selain itu menurut keputusan menteri ketenagakerjaan Nomor 37 Tahun 2017 mengenai penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia dalam pengolahan golongan pokok industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk bisa mengimbangi kemajuan teknologi dan keunggulan kompetitif dalam era globalisasi ini dengan menyiapkan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi terstandar menggunakan SKKNI sebagai acuan untuk mengembangkan program dan pendidikan. Di sisi lain SKKNI bagi pemerintah dapat menjadikan acuan sebagai pengembangan dan perumusan kebijakan (Ketenagakerjaan, 2017, pp. 11-22).

Dalam melakukan pengujian dan sertifikasi keselamatan dan kelayakan terhadap mobil, peran kementerian perhubungan menentukan kelayakan mobil-mobil yang telah dibuat oleh pabrikan lokal berdasarkan SNI yang telah tersertifikasi internasional, seperti pada peraturan menteri perhubungan republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor. Di mana dalam melakukan pengujian persyaratan yang harus dimiliki setiap mobil harus mampu dalam menjamin keselamatan secara teknis, mendukung kelestarian lingkungan seperti uji emisi, serta dalam pengujian tersebut harus memiliki fasilitas yang lengkap, tenaga penguji yang memiliki kompetensi dan peralatan penguji yang disesuaikan dengan teknologi sekarang (Perhubungan, 2018, pp. 1-7).

Dalam melakukan uji tipe kendaraan bermotor kementerian perhubungan memiliki Balai Penguji Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) dalam melakukan uji fisik maupun bentuk *Prototype* seperti uji emisi gas buang, pemeriksaan konstruksi, uji rem, pengukuran berat, uji klakson, maupun lampu utama, dengan bantuan alat-alat yang berstandar UNECE (United Nations Economic Commission For Europe) yang banyak dipakai oleh negara-negara eropa dan telah disesuaikan dengan regulasi di Indonesia dan menyesuaikan teknologi yang berkembang saat ini seperti gas buang Euro 4 untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebelum melakukan perakitan maupun di ekspor secara massal. Selain itu dalam pembentukan MRA (Mutual Recognition Agreement) di ASEAN, BPLJSKB

akan memfasilitasi teknologi terbaru untuk melakukan uji kendaraan yaitu *Proving Ground* atau uji *outdoor* di mana uji tersebut berbentuk lintasan khusus yang dapat melihat kinerja kendaraan dalam kecepatan, keseimbangan, gelombang, tanjakan dan turunan, berlumpur, genangan air, serta uji tabrakan (Mulidya, 2019, pp. 2-12).

- **Standar Vietnam**

Dalam melancarkan kembali ekspor mobil ke negara Vietnam masih banyak terdapat beberapa data yang belum diperbarui seperti dalam kualitas dan keamanan mesin, teknis, tingkat emisi udara, perlindungan lingkungan, kaca spion, sertifikat dari jenis ban yang telah di sertifikasi oleh organisasi maupun lembaga yang kompeten yang tertuang dalam sertifikasi VTA setiap mobil yang di produksi di Indonesia. Hal ini yang menyebabkan sulitnya mobil buatan Indonesia masuk kedalam pasar Vietnam yang berkaitan erat dengan *Decree No. 116/2017* dan *Circular No. 03/2018*, di mana persyaratan tersebut mengharuskan setiap para eksportir dan produsen mobil harus memiliki VTA yang sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan otoritas Vietnam guna meningkatkan standar mobil impor (Anh V. , 2018).

Pemerintah dalam proses administrasi untuk dapat menjalankan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri otomotif memiliki kegiatan yang berkaitan dengan pengarahan, kebijakan, maupun pengawasan sehingga industri otomotif berjalan secara efisien dan efektif, seperti dalam menangani

kasus terkait ekspor mobil ke Vietnam terkait administrasi teknis di mana dokumen-dokumen tersebut diberikan beberapa informasi tambahan dalam menerapkan kebijakan baru untuk uji emisi dan uji tipe yang telah di sertifikasi oleh organisasi maupun lembaga untuk dapat menyesuaikan dengan standar otomotif di negara Vietnam.

Perusahaan importir mobil harus memiliki sertifikat tertulis atau dokumen yang membuktikan bahwa mereka berwenang mewakili produsen atau perakitan mobil untuk dapat mengimpor kembali mobil cacat, dan memiliki lisensi yang dapat memastikan dalam pemeliharaan, dukungan teknis dan pasokan komponen serta garansi sesuai dengan *Decree No. 116/2017* dan *Circular No. 03/2018* sehingga diperlukan kewenangan dari kementerian perindustrian, kementerian perhubungan, dan perdagangan dalam melengkapi data-data yang terkait dalam dokumen tersebut sehingga perusahaan swasta dapat menjalankan tujuannya untuk meningkatkan penjualan serta peningkatan di industri otomotif yang lebih tertata.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mendorong industri otomotifnya memiliki pandangan yang tidak selalu searah dengan kepentingan dari pihak swasta seperti dalam menentukan arah kebijakan terhadap industri otomotif, peningkatan teknologi dalam meningkatkan kualitas serta standar yang mampu bersaing dengan negara-negara lain dalam memperjualbelikan produknya sehingga sesuai dengan

standar kualitas internasional dalam memenuhi persyaratan yang diminta negara lain.

Dalam kebijakan peningkatan komponen lokal yang memiliki biaya tinggi dalam pengembangan, produksi, maupun penelitiannya yang meliputi bahan dan tenaga kerja serta pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan peraturan yang ketat yang dapat membuat perusahaan mengeluarkan biaya tambahan untuk dapat membantu pemerintah dalam melancarkan kebijakan yang dikeluarkan, namun perusahaan tersebut mendukung program pemerintah dari sisi lain karena merupakan penopang utama dalam perkembangan industri otomotif nasional dalam meningkatkan penggunaan komponen lokal (Hartono & Santoso, 2013, pp. 85-88).

Hal ini membuat adanya peningkatan dalam industri otomotif dan mengurangi dari adanya ketergantungan dengan barang impor yang di aplikasikan kedalam mobil-mobil buatan pabrik Indonesia sehingga memaksa perusahaan swasta dalam membangun pabrik komponen baru yang harus menggunakan komponen lokal sebesar 80%, hal ini juga akan menarik investasi secara besar untuk dapat mengikuti intensif dari Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan industri otomotif nasional (Tambunan, 2010, pp. 28-33).

Untuk membuka kebuntuan ekspor mobil yang di alami Indonesia, Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan untuk melancarkan kembali ekspor mobil ke Vietnam. Kebijakan tersebut memuat tentang sertifikasi VTA Indonesia yang bersedia dalam memenuhi peraturan yang

terdapat dalam *Decree No. 116/2017* dan *Circular No. 03/2018*, sertifikasi tersebut diterima dan sudah tertuang hal-hal yang tercantum sesuai dengan keinginan otoritas Vietnam. Hal ini juga mendasari bagaimana Indonesia mampu menghormati kebijakan negara Vietnam serta menjaga hubungan dalam melakukan kerja sama (Perdagangan, 2018). Sehingga untuk mengembalikan ekspor mobil ke Vietnam, Indonesia hanya melakukan penyesuaian aturan terkait format sertifikasi VTA dalam menyesuaikan regulasi dengan Vietnam. Di sisi lain perbandingan surat uji tipe Indonesia dan Vietnam sudah sangat memenuhi kriteria yang di inginkan oleh otoritas Vietnam, sehingga pemerintah tidak melakukan pembuatan kebijakan baru dan hanya tetap pada peraturan Kepmenhub No. 9/2014.

Dengan demikian, pemerintah dalam mengatur kebijakan terhadap industri otomotif Indonesia melakukan pemaksaan dalam memenuhi kebutuhan terhadap standar internasional, berbagai macam cara seperti dalam meningkatkan SDM untuk dapat menciptakan inovasi maupun peningkatan di industri otomotif, hal ini mendasari bagaimana SDM yang memiliki tingkatan professional mampu mengaplikasikan transfer teknologi di Indonesia. Pemerintah bersama dengan menteri-menterinya meningkatkan taraf pengujian, sertifikasi, dan administrasi untuk dapat menyelaraskan standar internasional serta mencukupi permintaan dari negara lain, seperti negara Vietnam yang meminta peningkatan informasi dan dokumen dalam sertifikasi

VTA yang mereka terapkan di negara tersebut sehingga tidak kehilangan pasar dalam industri otomotif.

Pemerintah yang melakukan pemaksaan terhadap kebijakan-kebijakannya seperti penambahan standar untuk dapat menyelaraskan dengan standar internasional sangat bertabrakan dengan kepentingan pihak swasta dari segi ekonomi. Sebab kepentingan swasta tersebut terhambat oleh birokrasi yang dijalankan oleh pemerintah karena banyak memakan biaya serta waktu yang tidak sedikit. Belum lagi adanya kebijakan Vietnam yang membuat pihak swasta harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk dapat menyesuaikan sertifikasi, administrasi, pengujian dan biaya ekspor melalui kapal yang harus menunggu pemeriksaan *lot by lot* ketika mobil yang di ekspor sampai di Vietnam.

4.2 Developmental States: Civil Rights, Performance and Legitimacy

Pada sub bab ini akan menjelaskan bagaimana pemerintah menjaga industri otomotif melalui *Civil Right, Performance and Legitimacy* untuk dapat menekankan kebijakan yang represif dan mampu dijalankan dalam meningkatkan industri otomotif dan membuat produk otomotif Indonesia bisa masuk kembali ke pasar Vietnam. Dari adanya pemaksaan yang di berikan kepada perusahaan membuat banyaknya biaya dan waktu yang tidak sedikit, tetapi dengan cara memaksa tersebut mampu membuat perusahaan

meningkatkan penjualan yang berdampak sangat positif bagi perekonomian dan memberikan legitimasi yang terus berjalan hingga sekarang.

- **Tekanan kebijakan baru atas respon *Decree No. 116/2017* dan *Circular No.03/2018 Terhadap Civil Right***

Kebijakan memaksa yang dijalankan Presiden Joko Widodo dalam membangun industri otomotifnya sangat jelas berdampak pada pihak swasta dan hanya bisa menerima keputusan dari pemerintah melalui tekanan yang diberikan. Pihak swasta tidak diberikan ruang dan hak dalam pengambilan keputusan yang membuat perusahaan mengeluarkan banyak biaya dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah untuk dapat menyesuaikan dengan keputusan *Decree No. 116/2017* dan *Circular No. 03/2018* Vietnam. Kerugian yang di alami oleh perusahaan lokal mengakibatkan menurunnya ekspor mobil Indonesia seperti PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) pada periode Januari-Juli 2018 hanya mengirimkan 5.272 unit dan sepanjang tahun hanya meningkat sebesar 7.889 unit, ekspor mobil tersebut menurun dibandingkan dengan pengiriman Toyota pada tahun 2017 sebesar 12.222 unit.

Kinerja perusahaan industri otomotif Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan dari pemerintah untuk mengikuti peraturan Vietnam tersebut memberikan pekerjaan lebih untuk dapat menyesuaikan sertifikasi yang memiliki biaya tinggi dalam pengembangan produksi, serta waktu untuk menyesuaikan kebutuhan dokumen tentang persyaratan perakitan,

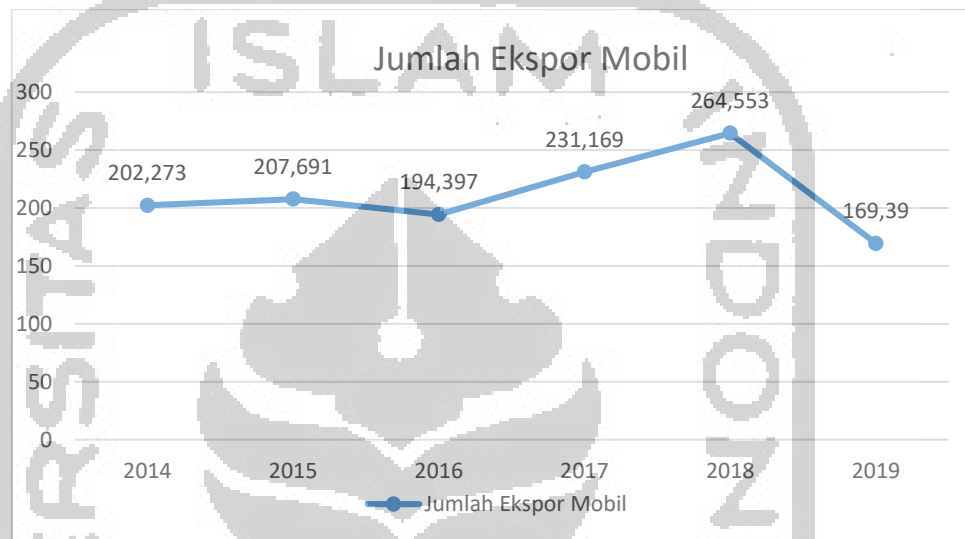
manufaktur, jaminan perdagangan jasa dan pemeliharaan motor, serta keamanan teknis dan lingkungan yang di perlukan jika mobil dari Indonesia di kembalikan jika tidak memenuhi syarat, serta pemeriksaan *lot by lot* yang membutuhkan waktu yang lama dalam uji kelayakan dan uji emisi dari otoritas Vietnam. Tekanan ini memberikan biaya tambahan bagi perusahaan untuk mengembalikan ekspor mobil ke negara Vietnam untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan ekonomi serta menstabilkan industri otomotif yang menurun pada tahun 2018.

- **Hasil pelaksanaan kebijakan (Performa)**

Pemberian tekanan pada perusahaan lokal melalui kebijakan yang di buat oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan penjualan serta mengembalikan ekspor mobil ke negara Vietnam membuat perusahaan lokal mengikuti persyaratan dari uji tipe dan kelayakan untuk mobil bertipe *Completely Build Up* (CBU) serta penambahan informasi data dan dokumen dengan VTA milik Vietnam, meskipun paksaan terhadap perusahaan lokal yang diberikan pemerintah membuat adanya penyesuaian yang memerlukan waktu yang lama hal ini memberikan performa yang mampu meningkatkan ekonomi serta peningkatan pada produksi dalam penjualan mobil yang di produksi di Indonesia.

Penjualan mobil Indonesia dari tahun 2014-2019 memberikan dampak positif meskipun tahun 2018 mengalami kendala ekspor ke Vietnam, tercatat

sejak tahun 2014 jumlah ekspor mobil bertipe CBU mencapai sekitar 202,273 ribu unit, 2015 mencapai 207,691 ribu unit, 2016 mengalami penurunan mencapai 194,397 ribu unit, 2017 mencapai 231,169 ribu unit, 2018 264,553 ribu unit, dan 2019 dari Januari-Juli 169,390 ribu unit.



Tabel 1: Jumlah Ekspor Mobil Indonesia (Jayani, 2019).

Sedangkan untuk jumlah ekspor mobil bertipe CBU Indonesia ke Vietnam pada tahun 2018-2019 mengalami hasil positif meskipun mengalami penurunan pada tahun 2018, di tahun 2019 Indonesia terus mendorong untuk meningkatkan penjualannya ke negara tersebut, data dari jumlah ekspor mobil Indonesia dari tahun 2018 hanya 17.798 unit, meskipun bulan Agustus ekspor ke Vietnam sudah dapat dilakukan, pada tahun 2019 periode Januari-Juli Indonesia sudah mampu mengekspor mobil sebanyak 22.557 unit dan meningkat sekitar 26,7 persen dibanding tahun lalu (Dananjaya, 2019).

Meskipun pemaksaan yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan lokal untuk menyesuaikan standar dengan Vietnam, namun hasilnya Indonesia mampu mengembalikan ekspor mobil yang sempat tertunda bahkan mengalami kenaikan pada tahun 2019 pada periode Januari-Juli. Pemerintah akhirnya memberikan performa kepada perusahaan lokal yang mampu meningkatkan ekonomi serta peningkatan pada produksi dalam penjualan mobil yang di produksi di Indonesia, selama 5 tahun terakhir pada tahun 2018 perakitan dan produksi mobil yang ada di Indonesia mengalami peningkatan dan yang paling tinggi yaitu sekitar 1,34 juta dari 17 merek mobil yang telah di produksi di Indonesia (Mola, 2019). Kenaikan jumlah ekspor Indonesia bertujuan untuk mengejar target perdagangan Indonesia-Vietnam sebesar USD 10 miliar pada tahun 2020.

- **Legitimasi**

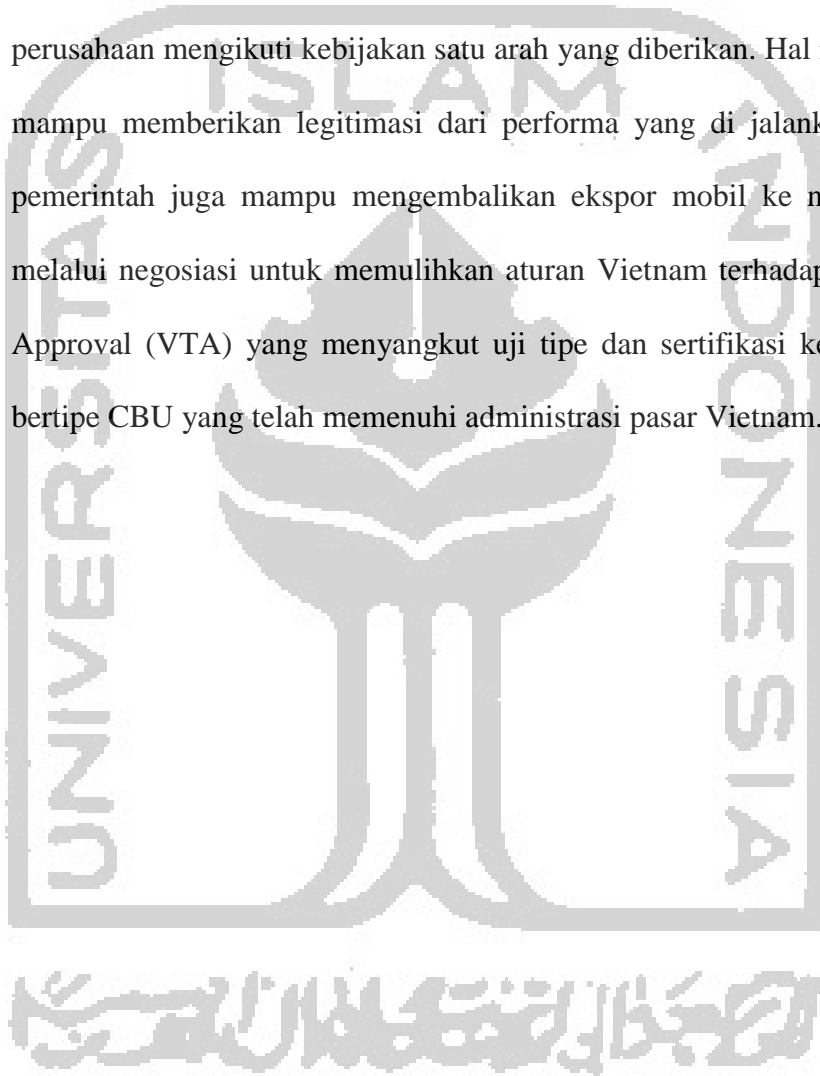
Legitimasi yang di jalankan oleh Presiden Joko Widodo hingga saat ini terus berjalan karena memberikan performa yang baik. Meskipun terdapat paksaan untuk menjalankannya namun perusahaan lokal memberikan hasil yang positif dalam penjualan mobil Indonesia hingga tahun 2019 periode Januari-Juli. Presiden Joko Widodo dalam memberikan kebijakan untuk mengembalikan ekspor mobil ke Vietnam sebelumnya melakukan diplomasi, sebab cara tersebut merupakan langkah yang tepat untuk menjaga hubungan ke

2 negara yang telah melakukan kerja sama yang sudah terjalin hingga 50 tahun.

Dalam penyesuaian aturan yang disetujui pemerintah Indonesia terkait *Decree No. 116/2017* dan *Circular No. 03/2018* memang memberatkan perusahaan untuk mengimplementasikan kebijakan dari persyaratan uji tipe dan kelayakan bagi mobil bertipe CBU. Sehingga sesuai dengan *Vehicle Type Approval (VTA)* milik Vietnam yang memakan banyak waktu. Skema yang dijalankan pemerintah justru memberikan dorongan terhadap perusahaan lokal dalam meningkatkan penjualannya untuk mengejar kerugian yang terjadi pada tahun 2018. Pemerintah memberikan *power* untuk para pengusaha dalam meningkatkan produksi yang lebih banyak sehingga akan mampu meningkatkan ekspor. Konsistensi dari perusahaan lokal sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah untuk meningkatkan penjualan serta pemasukan ekonomi bagi PDB Indonesia bahkan dalam persaingan di pasar global. Hal ini juga akan membuat Indonesia menjadi bagian dari *global supply chain* dan bukan lagi sebagai pensubsidi ekspor (Ekarina, 2018).

Dengan demikian, tekanan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi dan industri otomotif nasional melalui kebijakan yang telah di susun bersama elit birokrasinya memberikan kerugian dari segi biaya dan waktu yang banyak bagi perusahaan lokal. Namun hal tersebut memberikan kebijakan yang terstruktur sehingga mampu meningkatkan penjualan mobil Indonesia di pasar Internasional, bersamaan dengan menurunnya penjualan ke

negara Vietnam pada tahun 2018 justru mampu meningkatkan ekspor pada tahun 2019 guna mengejar target perdagangan Indonesia-Vietnam sebesar USD 10 miliar pada tahun 2020. Kepentingan dari perusahaan yang seharusnya menimbulkan perlawanan kepada pemerintah justru mampu membuat perusahaan mengikuti kebijakan satu arah yang diberikan. Hal ini dikarenakan mampu memberikan legitimasi dari performa yang di jalankan. Selain itu, pemerintah juga mampu mengembalikan ekspor mobil ke negara Vietnam melalui negosiasi untuk memulihkan aturan Vietnam terhadap Vehicle Type Approval (VTA) yang menyangkut uji tipe dan sertifikasi kelayakan mobil bertipe CBU yang telah memenuhi administrasi pasar Vietnam.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Indikator-indikator yang terdapat dalam teori *Developmental Elite* yang di jelaskan oleh Adrian Leftwich dalam pengaplikasian terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap strategi Indonesia dalam menghadapi hambatan ekspor mobil oleh pemerintah Vietnam pada masa pemerintahan Joko Widodo tahun 2017-2019 sebagai berikut:

1. *The Developmental Elite*

Dalam *Developmental Elite* ini menjelaskan bagaimana Presiden Joko Widodo yang memiliki hubungan yang erat dengan aktor-aktor lain bersama-sama untuk mempercepat pertumbuhan terhadap industri otomotif melalui intervensi yang diberikan, pemerintah yang memiliki kewenangan yang sangat berpengaruh bagi *Private Sector* juga dapat menyesuaikan kebijakan dan regulasi untuk dapat memajukan perusahaan dan meningkatkan daya saing terlebih lagi adanya hubungan yang kuat terhadap menteri-menterinya yang pernah menjabat sebagai direktur dalam perusahaan yang bergerak dalam industri otomotif. Adanya keterkaitan antara Presiden Joko Widodo dengan menteri perindustrian, menteri perhubungan, menteri perdagangan, menteri luar negeri, dan GAIKINDO

memberikan hasil yang optimal untuk menyelesaikan masalah terkait ekspor mobil ke negara Vietnam.

2. *Relative Autonomy Of The Developmental State*

Kewenangan pemerintah yang memiliki batasan dan tidak dapat memaksa secara langsung hanya bisa memberikan arahan melalui intensif terhadap kebijakan yang dikeluarkan serta peraturan seperti pajak *Tax Holiday*, *Tax Allowance*, *Super Deductible Tax*, PPnBM untuk menjaga stabilitas ekspor-impor, dan penggunaan TKDN. Selain itu dalam kewenangan pemerintah terhadap perdagangan internasional juga memiliki keterbatasan sehingga melakukan upaya dalam menjaga industri otomotifnya dengan cara mengikuti aturan dalam perjanjian internasional seperti WTO, melakukan penyesuaian kebutuhan administratif domestik dengan standar internasional, dan diplomasi perdagangan dengan cara melakukan pendekatan persuasif yaitu mengirimkan delegasi untuk dapat melancarkan kembali ekspor mobil ke negara Vietnam guna menjaga stabilitas perekonomian dan industri otomotif nasional, serta hubungan antar sesama negara.

3. *The Economic Bureaucracy: Power, Competence, Insulation and Penetration*

Lembaga yang terhubung dengan pemerintah memiliki tugas dalam mengontrol, memberi strategi, dan mengeluarkan kebijakan terhadap industri otomotif serta melancarkan kembali ekspor mobil ke negara Vietnam, seperti kementerian perindustrian yang mampu mengembangkan industri komponen dalam negeri, peningkatan SDM, riset & teknologi, dan menjadi koordinator bagi

menteri-menteri lainnya dalam menjaga industri otomotif terkait persyaratan dan sertifikasi yang harus sesuai dengan VTA Vietnam sehingga ekspor otomotif berjalan normal kembali, kementerian perdagangan berperan dalam memposisikan Indonesia untuk bernegosiasi, diplomasi, dalam forum regional, maupun bilateral, dimana artinya hal ini mencakup aspek-aspek ekonomi, politik, budaya, keamanan, dan sosial, dan memberikan konsultasi teknis terhadap pemerintah Vietnam untuk mempercepat proses regulasi terkait aktivitas ekspor mobil Indonesia yang sempat mengalami kendala terkait perizinan dan segera di pulihkan, kementerian perhubungan melakukan diplomasi dengan pemerintah Vietnam dengan cara menjelaskan bagaimana proses uji emisi dan teknologi melalui data-data untuk uji tipe kendaraan yang ada di Indonesia yang telah memiliki sertifikasi internasional dalam keselamatan dan emisi, GAIKINDO yang merupakan pihak swasta membantu pemerintah dengan menentukan arah kebijakan dan penjualan dalam domestik maupun luar negeri, dan kementerian luar negeri yang merupakan mediator untuk berdiplomasi dan negosiasi terhadap pemerintah Vietnam sehingga memberikan solusi yang sama-sama menguntungkan untuk kedua negara terkait regulasi *Decree no.116* dan *Circular no.3*.

4. *Developmental States and Civil Society*

Perumusan kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat karna dianggap lemah menggambarkan bahwa kebijakan yang di keluarkan pemerintah lebih mengarah kepada kebutuhan industri otomotif dan perusahaan, meskipun hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya tidak diperhatikan dalam dunia

industri otomotif, GAIKINDO berperan dalam meningkatkan penjualannya di pasar dan melakukan distribusi, promosi, maupun pengembangan industri otomotif. GAIKINDO sangat berperan aktif bagi pemerintah dalam memberikan masukan-masukan yang diperlukan pemerintah dalam merumuskan kebijakan maupun program yang sesuai untuk kedepannya dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan penjualan dan penyelenggaraan acara seperti GIIAS sehingga masyarakat menerima hasil kemajuan teknologi dan pendidikan, serta lapangan pekerjaan. Birokrasi yang berjalan sesuai dengan keinginan pemerintah tidak melibatkan *civil society* karena posisi yang sangat sempit dan lemah untuk terlibat dalam menentukan arah. Meskipun hadirnya GAIKINDO di Indonesia membantu masyarakat dalam memenuhi pasar tetapi yang paling dominan di sini adalah birokrasinya yang hanya mementingkan kepentingan dari perusahaan industri otomotif sehingga masyarakat di sini tidak diperhatikan.

5. *The Effective Management of Non-State Economic Interests*

Untuk dapat mendorong industri otomotif, maka pemerintah membuat kebijakan yang memaksa perusahaan lokal. Pemaksaan tersebut membuat perusahaan mengeluarkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, seperti peningkatan teknologi, SDM, maupun penelitian dan peningkatan kualitas standar yang mampu bersaing dengan negara-negara lain. Sehingga dalam hal ini, pemerintah melalui kementerian perdagangan mengeluarkan kebijakan untuk mengikuti kebijakan terkait *Decree No.116/2017* dan *Circular No.03/2018* dalam menyesuaikan, sertifikasi, dan administrasi. Meskipun pemerintah melakukan paksaan terhadap

pihak swasta, namun hal ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui Industri otomotif.

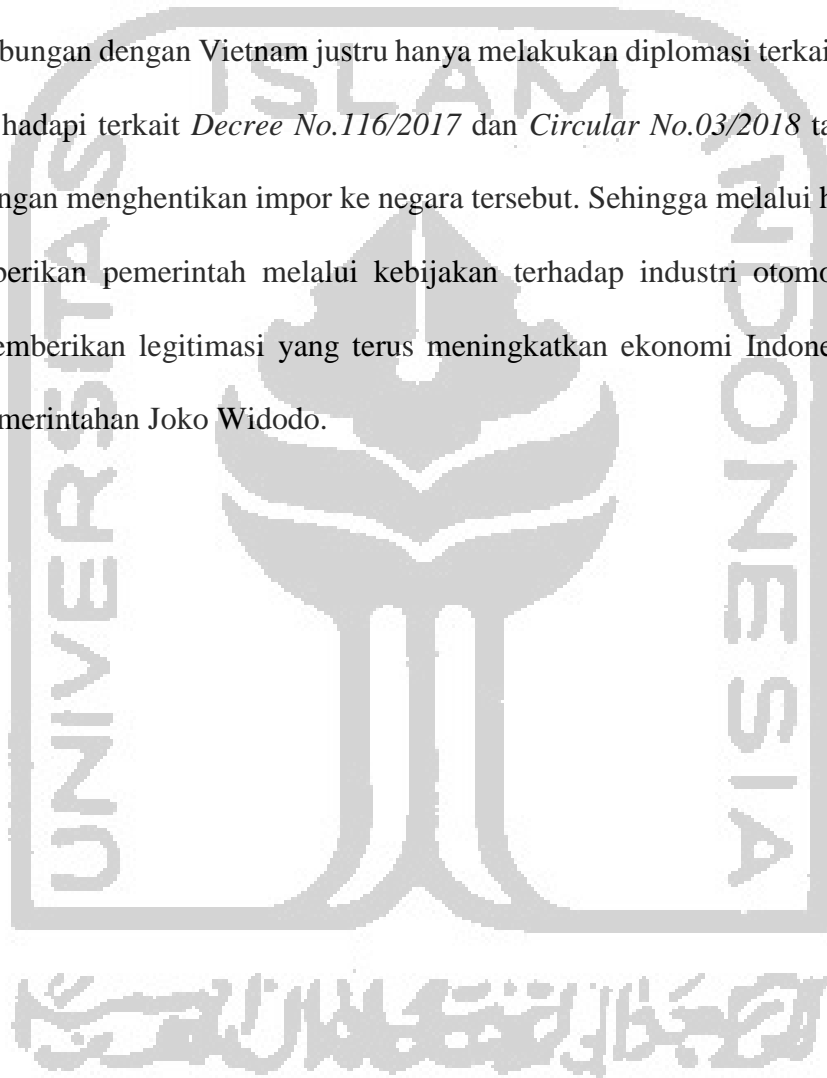
6. *Developmental State: Civil Rights, Performance and Legitimacy*

Kebijakan memaksa yang dijalankan Presiden Joko Widodo dalam membangun industri otomotifnya sangat jelas berdampak terhadap pihak swasta dan hanya bisa menerima keputusan dari pemerintah melalui tekanan yang diberikan. Tekanan tersebut memberikan biaya tambahan bagi perusahaan untuk mengembalikan ekspor mobil ke negara Vietnam dalam memenuhi syarat teknis terkait pengujian dan sertifikasi. Langkah yang optimal dalam mengharmonisasi aturan Vietnam terhadap Vehicle Type Approval (VTA) justru memberikan performa yang positif bagi peningkatan produksi mobil di Indonesia. Namun kebijakan yang tidak searah dengan perusahaan lokal tersebut justru mampu dibuktikan oleh pemerintah melalui performa yang memberikan legitimasi yang terus berjalan hingga saat ini.

Dengan demikian, adanya hubungan yang terjalin antara pemerintah beserta elit birokrasinya seperti kementerian perindustrian, kementerian perdagangan, kementerian perhubungan, GAIKINDO, dan kementerian luar negeri, dalam melakukan kerja sama di bidang Industri otomotif, memudahkan pemerintah dalam menyelesaikan hambatan ekspor mobil ke negara Vietnam. Selain itu dalam kerja sama yang terjalin memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk mendorong industri otomotifnya terus berkembang seiring perkembangan zaman. kebijakan yang di keluarkan pemerintah sangat memerlukan kerja sama dari elit-elit yang

berada dalam industri otomotif ini sehingga mampu membantu Indonesia dalam menyelamatkan ekonomi yang menurun akibat adanya *Decree No.116/2017* dan *Circular No.03/2018*.

Pemerintah yang mampu melihat prospek menjanjikan dengan menjaga hubungan dengan Vietnam justru hanya melakukan diplomasi terkait masalah yang di hadapi terkait *Decree No.116/2017* dan *Circular No.03/2018* tanpa membalas dengan menghentikan impor ke negara tersebut. Sehingga melalui hasil-hasil yang diberikan pemerintah melalui kebijakan terhadap industri otomotifnya mampu memberikan legitimasi yang terus meningkatkan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo.



DAFTAR ISI

- Adnan, R. S. (2014, Januari). Dinamika Struktur-Agensi dalam Perkembangan Industri Otomotif Indonesia. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, XIX(1), 77-92.
- Anh, T. T., Ngoc, L. M., & Hurong, N. Q. (2017, Maret). An Assessment of the Potential Economic Impact of RCEP on Vietnam Automobile Sector. *World Trade Institute*, 1-12. Vietnam: SSRN.
- Anh, V. (2018, Juni 14). *Decree 116 Moves Foreign Car Makers To Expand Production in Vietnam*. Retrieved Oktober 4, 2019, from Vietnam Investment Review: <https://www.vir.com.vn/decre-116-moves-foreign-car-makers-to-expand-production-in-vietnam-60107.html>
- Aria, P. (2017, agustus 14). *katadata*. Retrieved from Indonesia Andalkan Otomotif untuk Tutup Defisit dengan Vietnam: <https://katadata.co.id/berita/2017/08/14/indonesia-andalkan-otomotif-untuk-atasi-defisit-dengan-vietnam>
- Arianti, R. K., & Lubis, A. D. (2011, Juli). Analisis Daya Saing dan Kesiapan Indonesia Dalam Rangka Integritas ASEAN: Studi Kasus Automotives, Rubber Based, dan Agro Based Product. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, V(1), 1-21.
- Arifin, H. B., Supriyanto, A., Kusnadi, A. S., Repa, R. M., & Lamria, W. V. (2018, juli 7). Garda Depan Pembela Ekspor Indonesia. *Info Perdagangan Perdagangan Penopang Ekonomi Bangsa*, 7-17, IV. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Perdagangan. Retrieved Agustus 26, 2019, from <https://www.kemendag.go.id/files/pdf/2019/05/23/Info-Perdagangan-Ed-4-2018-WebRes.pdf>

- Atmoko, A. F. (2016, Februari 23). *Menperin: Gaikindo Mitra Strategis Pemerintah*. Retrieved September 25, 2019, from mediaindonesia:
<https://mediaindonesia.com/read/detail/30179-menperin-gaikindo-mitra-strategis-pemerintah>
- Budiman, A. (2006). *KEBEBASAN, NEGARA, PEMBANGUNAN Kumpulan Tulisan, 1965-2005*. (L. A. Stanley, & E. Endarmoko, Eds.) Jakarta, Indonesia: Pustaka Alvabet dan Freedom Institute. Retrieved September 20, 2019
- Chalmers, I., Jobhaar, M., & Arini, T. E. (1996). *KONLOMERASI: NEGARA DAN MODAL DALAM INDUSTRI OTOMOTIF INDONESIA 1950-1985*. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama. Retrieved September 25, 2019
- CNN, I. (2018, 10 13). *Jokowi dan PM Vietnam Sepakat Atasi Hambatan Ekspor Otomotif*. Retrieved from CNN Indonesia:
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181012161957-384-338008/jokowi-dan-pm-vietnam-sepakat-atasi-hambatan-ekspor-otomotif>
- Dananjaya, D. (2019, Oktober 7). *Berapa Banyak Ekspor Otomotif dari Indonesia ke Vietnam*. Retrieved Oktober 27, 2019, from Otomotif Kompas:
<https://otomotif.kompas.com/read/2019/10/07/082200015/berapa-banyak-ekspor-otomotif-dari-indonesia-ke-vietnam->
- Daud, A. (2018, Agustus 2). *Ekspor Mobil Terhambat Aturan, Jokowi Lobi Perdana Menteri Vietnam*. (M. Nafi, Editor) Retrieved Agustus 12, 2019, from Katadata.co.id: <https://katadata.co.id/berita/2018/08/02/ekspor-mobil-terhambat-aturan-jokowi-lobi-perdana-menteri-vietnam>
- Dewayana, T. S., Sugiarto, D., & Hetharia, D. (2012). Peluang dan Tantangan Industri Komponen Otomotif Indonesia. *Journal unipdu*, 1, 5.
- Ekarina. (2018, Desember 31). *Prospek Bisnis Otomotif 2019: Potensi Besar Volume Penjualan Stagnan*. Retrieved Oktober 21, 2019, from katadata:

<https://katadata.co.id/berita/2018/12/31/prospek-bisnis-otomotif-2019-potensi-besar-volume-penjualan-stagnan>

- Fauzie, Y. Y. (2018, februari 19). *Kisruh Ekspor Mobil ke Vietnam, Menperin Anggap Tak Lumrah*. Retrieved from CNN Indonesia :
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180219120149-92-277133/kisruh-ekspor-mobil-ke-vietnam-menperin-anggap-tak-lumrah>
- Gaikindo. (2018, September 20). *Pemerintah RI Dorong Ekspor Industri Otomotif*. Retrieved September 20, 2019, from gaikindo.or.id:
<https://www.gaikindo.or.id/pemerintah-ri-dorong-ekspor-industri-otomotif/>
- Hamdani, T. (2018, Februari 19). *RI Lobi Vietnam Soal Aturan Standar Kelayakan Mobil Impor*. Retrieved from Finance Detik:
<https://finance.detik.com/industri/d-3874650/ri-lobi-vietnam-soal-aturan-standar-kelayakan-mobil-impor>
- Hansen, A. (2016). Driving Development? The Problems and Promises of the Car in Vietnam. *Journal of Contemporary Asia*, 46, 558-564.
- Hartono, G., & Santoso, A. (2013). Analisis Penerapan Strategi Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pada Industri Manufaktur di Indonesia: Studi Kasus Pada Komponen Kopling. *INASEA*, 14, 85-88. Retrieved Oktober 6, 2019
- Hendra S, F. (2017). ANALISIS TINGKAT KEMATANGAN INDUSTRI KOMPONEN OTOMOTIF DI INDONESIA. *SINTEK Jurnal*, 11, 40-48. Retrieved September 25, 2019
- Idris, M. (2015, juli 27). *Kenaikan Pajak Barang Impor Agar Produk Lokal Bisa Bertahan*. Retrieved from finance detik: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2976267/kenaikan-pajak-barang-impor-agar-produk-lokal-bisa-bertahan>

- Investments, I. (2018, Mei 1). *Indonesia May File WTO Complaint over Vietnam's Car Import Policy*. Retrieved Agustus 22, 2019, from Indonesia Investments: <https://www.indonesia-investments.com/id/news/news-columns/indonesia-may-file-wto-complaint-over-vietnam-s-car-import-policy/item8770?>
- Isra, S. (2016, April 14). *Menjadi Pembantu Presiden*. Retrieved Agustus 22, 2019, from saldiisra.web.id: <https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/618-menjadi-pembantu-presiden.html>
- Jannah, S. M. (2018, februari 16). *Ekspor Mobil RI ke Vietnam Bisa Terhambat, Ini Langkah Pemerintah*. Retrieved from Finance detik: <https://finance.detik.com/industri/d-3870729/ekspor-mobil-ri-ke-vietnam-bisa-terhambat-ini-langkah-pemerintah>
- Jayani, D. H. (2019, Agustus 27). *Ekspor Mobil CBU Indonesia Capai 169,4 Ribu Unit Hingga Juli 2019*. Retrieved Oktober 29, 2019, from Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/27/ekspor-mobil-cbu-indonesia-capai-1694-ribu-unit-hingga-juli-2019>
- Julianto, P. A. (2016, April 10). *Menperin: Tingkatkan Produksi, Industri Otomotif Mesti Perbanyak Pabrik di Indonesia*. Retrieved September 25, 2019, from kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2016/04/10/211153726/Menperin.Minta.Industri.Otomotif.Perbanyak.Pabrik.Mesin.dan.Komponen.di.Indonesia?page=1>
- Katadata. (2019, Februari 12). *Ekspor Mobil CBU Indonesia Tumbuh 14%*. Retrieved from Katadata: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/12/ekspor-mobil-cbu-indonesia-tumbuh-14>
- kemendag. (2019, juni 19). *kemendag Dukung Penyederhanaan Prosedur Perdagangan Internasional*. Retrieved September 14, 2019, from

kemendag.go.id: <https://www.kemendag.go.id/id/news/2019/06/20/kemendag-dukung-penyederhanaan-prosedur-perdagangan-internasional>

kemenperin. (2019, juni 24). *Geliat Industri Otomotif Semakin Ngebut*. Retrieved from kemenperin.go.id: <http://www.kemenperin.go.id/artikel/19753/Geliat-Industri-Otomotif-Semakin-Ngebut>

Kemenperin. (2019, Agustus 3). *Pemerintah Segera Realisasikan Insentif 'Super Deductible Tax'*. Retrieved from kemenperin: <https://kemenperin.go.id/artikel/20315/Pemerintah-Segera-Realisasikan-Insentif-%E2%80%98Super-Deductible-Tax%E2%80%99>

Kemlu. (2019, Juni 28). *Ekspor Mobil Indonesia ke Vietnam Diharapkan Tembus USD 600 Juta di 2019*. Retrieved September 25, 2019, from Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Hanoi, Republik Sosialis Vietnam: <https://kemlu.go.id/hanoi/id/news/1544/ekspor-mobil-indonesia-ke-vietnam-diharapkan-tembus-usd-600-juta-di-2019>

Ketenagakerjaan, K. (2017, Maret 6). Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer Bidang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih. *Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017*, 11-22. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kemenperin. Retrieved Oktober 1, 2019

Keuangan, K. (2018, 10 18). *Tax Holiday Melalui PMK 35/PMK.010/2018 Mulai Dorong Investasi*. Retrieved from Kementerian Keuangan: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/tax-holiday-melalui-pmk-35pmk0102018-mulai-dorong-investasi/>

Kurniawan, A. (2014, Maret 3). Diplomasi Ekonomi Indonesia dan Thailand terhadap Pasar Timur Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17, 257-259.
Retrieved September 20, 2019

Kurniawan, A. (2016, Juli 1). *IOI Siapkan Standar SDM Otomotif Level Internasional*. Retrieved Oktober 1, 2019, from Otomotif Kompas:
<https://otomotif.kompas.com/read/2016/07/01/084200615/IOI.Siapkan.Standar.SDM.Otomotif.Level.Internasional>

Leftwich, A. (1995). Bringing Politics Back In: Towards a Model of the Developmental State. *The Journal of Development Studies*, 31, 400-427.

Lisbet. (2017, Agustus). Peningkatan Kerja Sama Bilateral Indonesia-Vietnam. *Majalah Info Singkat Hubungan Internasional*, IX(16), 5-8.

Mola, T. (2019, Februari 25). *Dua Faktor Pendongkrak Produksi Mobil Indonesia*. Retrieved Oktober 21, 2019, from otomotif Bisnis:
<https://otomotif.bisnis.com/read/20190225/275/893206/dua-faktor-pendongkrak-produksi-mobil-indonesia>

Mulidya, I. (2019). Kesiapan Angkutan Jalan Dalam Menghadapi Penerapan Standar Emisi Euro 4. *Warta Penelitian Perhubungan*, 31, 2-12. Retrieved Oktober 3, 2019

Nguyen, C. D., Nguyen, A. N., Nguyen, T. H., & Nguyen, M. N. (2016). Host-Site Institutions, Regional Production linkages and technological upgrading: a study of automotive firms in Vietnam. *Asia Pacific Business Review*, 23(3), 1-13.

Onishi, T. (2019, februari 6). *Vietnam keeps tough auto import rules despite criticism*. Retrieved from Nikkei Asian Review:
<https://asia.nikkei.com/Economy/Vietnam-keeps-tough-auto-import-rules-despite-criticism>

- Pajak, O. (2016, Desember 5). *Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)*. Retrieved from Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/pajak-penjualan-atas-barang-mewah-ppnbnm>
- Perdagangan, K. (2018, Maret 1). *Peluang Ekspor Otomotif Indonesia Ke Vietnam Kembali Terbuka*. Retrieved Oktober 29, 2019, from Siaran Pers: <https://www.kemendag.go.id/files/pdf/2018/03/01/peluang-ekspor-otomotif-indonesia-ke-vietnam-kembali-terbuka-id0-1519894487.pdf>
- Perhubungan, K. (2018, April 24). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor*. Retrieved Oktober 5, 2019, from jdih.dephub.go.id: http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2018/PM_33_TAHUN_2018.pdf
- perhubungan, k. (2019, juli 17). *Menhub: Transportasi Sudah Menjadi Kebutuhan Dasar Masyarakat*. Retrieved from Kementerian Perhubungan Republik Indonesia: <http://dephub.go.id/post/read/menhub-transportasi-sudah-menjadi-kebutuhan-dasar-masyarakat?language=id>
- perindustrian, K. (2019, Agustus 20). *Menatap Kebijakan Mobil Murah*. Retrieved from Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: <https://kemenperin.go.id/artikel/7185/Menatap-Kebijakan-Mobil-Murah>
- Preece, R. (2016). Reforming Automobile Excise Taxes in the ASEAN Region for Pro-growth And Pro-Environment Outcomes. *World Customs Journal*, X(01), 45-72.
- Primadhyta, S. (2018, Maret 2). *Kemendag Janjikan Ekspor Mobil ke Vietnam Segera Pulih*. Retrieved September 25, 2019, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180302082028-92-279863/kemendag-janjikan-ekspor-mobil-ke-vietnam-segera-pulih>

- Priyanto, W. (2018, maret 25). *Indonesia Pimpin Penjualan Mobil ASEAN, Thailand Juara Produksi*. Retrieved from otomotif.tempo.co:
<https://otomotif.tempo.co/read/1072984/indonesia-pimpin-penjualan-mobil-asean-thailand-juara-produksi/full&view=ok>
- Publik, B. K. (2018, Maret 23). *Sinergi Untuk Wujudkan Ekspor Secara Direct Call*. Retrieved September 20, 2019, from dephub.go.id:
<http://dephub.go.id/post/read/sinergi-untuk-wujudkan-ekspor-secara-direct-call>
- Quraisyi, Marjono, & Soepeno, B. (2017). Jokowi Leadership Model as Mayor of Solo 2005-2010. *Jurnam Historica*, 1, 193-194.
- Ratnaningsih, H. (2015). Indonesia Juara MEA, Mengapa Tidak? In *ASEAN Satu Komunitas Satu Identitas* (pp. 63-64). Yogyakarta, Sleman, Indonesia: Deepublish. Retrieved September 18, 2019
- Reily, M., & Ekarina. (2018, februari 19). *Ekspor Kendaraan RI Dijegal, Pemerintah Siap Bertolak Ke Vietnam*. Retrieved September 14, 2019, from katadata.co.id: <https://katadata.co.id/berita/2018/02/19/ekspor-kendaraan-ri-dijegal-pemerintah-siap-bertolak-ke-vietnam>
- Reistekdikti. (2018, Maret 20). *Indonesia dan Swiss Kerjasama Pengembangan Pendidikan Vokasi*. Retrieved September 25, 2019, from ristekdikti:
<https://ristekdikti.go.id/kabar/indonesia-dan-swiss-kerjasama-pengembangan-pendidikan-vokasi/>
- Rudi, A., & Ferdian, A. (2018, Agustus 10). *Vietnam Ancaman Baru Bagi Industri Otomotif Indonesia*. Retrieved September 20, 2019, from Otomotif Kompas:
<https://otomotif.kompas.com/read/2018/08/10/074200315/vietnam-ancaman-baru-bagi-industri-otomotif-indonesia>

- Salim , A. R. (2019, April 30). Tantangan SDM Menghadapi Industri 4.0 Profesionalisme. *JIMEA, 1*, 25-29. Retrieved Oktober 1, 2019
- Satriawan, F., & yuliana S.T., M.S.M., E. (2016). PENGARUH SALES PROMOTION TERHADAP PENJUALAN MOBIL MEREK TATA MOTORS DI GAIKINDO INDONESIA INTERNASIONAL AUTO SHOW (GIAS) 2015. *e-Proceeding of Management, 3*, 2961-2967. Retrieved September 18, 2019
- Satya, V. E. (2018). STRATEGI INDONESIA MENGHADAPI INDUSTRI 4.0. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, 10*, 21-23. Retrieved September 20, 2019
- Setiawan, K. (2019, Juni 25). *2 Poin Intensif PP Super Deductible Tax yang Terbit Juli*. Retrieved from Bisnis Tempo: <https://bisnis.tempo.co/read/1218029/2-poin-insentif-pp-super-deductible-tax-yang-terbit-juli/full&view=ok>
- Siregar, B. P. (2019, meii 15). *Mobil-mobil Masa Depan Siap Mejang di GIIAS 2019*. Retrieved from wartaekonomi: <https://www.wartaekonomi.co.id/read227827/mobil-mobil-masa-depan-siap-mejang-di-giias-2019.html>
- Sugiarto, E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Supriyanto, Y. (2018, Februari 26). *Ekspor Mobil ke Vietnam, Tim Delri Memulai Pembicaraan*. Retrieved September 16, 2019, from otomotif bisnis: <https://otomotif.bisnis.com/read/20180226/275/743557/ekspor-mobil-ke-vietnam-tim-delri-memulai-pembicaraan>
- Suropati, U., Montratama, I., & Sulaiman, Y. (2018). *INDONESIA Peta Menuju Poros Maritim Dunia*. Jakarta, Indonesia: PT. Elex Media Komputindo. Retrieved September 20, 2019

Tambunan, T. (2010). Perkembangan Industri Nasional dan Peran PMA. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 18, 28-33. Retrieved Oktober 6, 2019

thuvienphapluat. (2018). *thuvienphapluat*. Retrieved from Circular/03/2018/TT-BGTVT technical and environmental safety inspection of imported motor vehicles: <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Circular-03-2018-TT-BGTVT-technical-and-environmental-safety-inspection-of-imported-motor-vehicles-374393.aspx>

Viva. (2019, juli 28). *Profil Rini Mariani Soemarno*. Retrieved from Viva.co.id: <https://www.viva.co.id/siapa/read/238-rini-soemarno>

Yolanda, F. (2018, september 13). *republika*. Retrieved from Indonesia Minta Vietnam Permudah Ekspor Mobil: <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/09/13/pezmu1370-indonesia-minta-vietnam-permudah-ekspor-mobil>

